

**LAPORAN PENELITIAN  
SKEMA MANDIRI**

**KAJIAN SOSIAL-EKONOMI DAN GENDER DI SUB-DAS WAY KHILAU,  
SUB-DAS BULOK, DAS SEKAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG**



Oleh:  
Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.  
NIDN: 0021096102

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
AGUSTUS 2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul	KAJIAN SOSIAL-EKONOMI DAN GENDER DI SUB-DAS WAY KHILAU, SUB-DAS BULOK, DAS SEKAMPUNG, PROVINSI LAMPUNG
Bidang Penelitian	Sosial Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Alam
Peneliti	
a. Nama	Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.
b. Jenis kelamin	Laki-laki
c. NIP/NIDN	196109211987031003/0021096102
d. Pangkat/Golongan	Pembina/IVA
e. Jabatan fungsional	Lektor Kepala
f. Fakultas/Jurusan	Pertanian/Agribisnis
g. Alamat	Jl. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung
h. Alamat rumah	Perumahan Korpri Blok D5 No 14, Sukarame, Bandar Lampung, 35131
i. Telp/Fax	0721-784670/0721784670
Anggota Peneliti	-
Lokasi Penelitian	Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran
Dana Penelitian	Rp. 17.500.000 Mandiri



Dekan Fakultas Pertanian Unila

Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.S.  
NIP 19610210201986031003

Bandar Lampung, 30 Agustus 2018  
Peneliti,

Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S.  
NIP 196109211987031003

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung



Warsono, Ph.D.

NIP 196302161987031003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
RINGKASAN .....	iv
SUMMARY .....	vi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Desain Proyek .....	2
1.3 Tujuan .....	3
II. METODE PENELITIAN .....	4
2.1 Scoping dan Model Penelitian .....	4
2.2 Data dan informasi yang dikumpulkan .....	4
2.3 Responden .....	4
2.4 Metode Analisis .....	4
III. HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN .....	6
3.1 Geografis dan Infrastruktur .....	6
3.2 Demografi .....	7
3.3 Aktivitas Ekonomi .....	8
3.4 Karakteristik responden terkait sosek dan gender .....	9
3.4.1 Identitas responden .....	9
3.4.2 Aktivitas usahatani .....	9
3.5 Kajian KAP (Knowledge, Attitude, and Practice) .....	11
3.6 Kajian Gender .....	16
3.7 Kearifan lokal, property rights, dan persepsi terhadap lingkungan .....	19
3.8 Mekanisme Insentif .....	19
3.9 Best Practive/Model Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan .....	21
3.10 Pengelolaan Sampah, sumber air, dan sanitasi .....	21
3.11 Potensi jasa lingkungan .....	22
3.12 Potensi risiko .....	24
3.13 Usulan Indikator Sosio-Ekonomi dan Gender .....	26
IV REKOMENDASI .....	28
DAFTAR PUSTAKA .....	34
LAMPIRAN .....	35

## RINGKASAN

Konvensi Rio menghasilkan 3 konvensi PBB yaitu Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi tentang Mengurangi Penggurunan/Degradasi Lahan, dan Konvensi tentang Perubahan Iklim. Ketiga konvensi tersebut terkait satu sama lainnya sehingga mereka sebenarnya merupakan satu kesatuan. Implementasi Konvensi PBB (Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Degradasi Lahan) membutuhkan bukti nyata di tingkat tapak.

Kendati di tingkat nasional ketiga konvensi tersebut sudah diratifikasi serta dilanjutkan dengan undang-undang/peraturan pemerintah yang relevan, pada tataran daerah hal tersebut masih kurang. Proyek *Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanisms for Sustainable Watershed/Land Management (CCCD)* bertujuan agar ketiga isu konvensi tersebut dapat diimplementasikan pada skala daerah.

Sesuai dengan keputusan dari Direktorat PEP DAS No 13/PEPDAS/P2DAS/KLN.0/3/2018, implementasi proyek ini untuk di Provinsi Lampung yaitu pada Sub Sub DAS Way Khilau, Sub-DAS Bulok, DAS Sekampung yang disebut dengan Model DAS Mikro. Walaupun Sub-DAS Way Khilau merupakan Sub-DAS yang kecil (600 ha), namun memiliki peran penting dalam menjaga kondisi DAS di bawahnya.

Tujuan kajian yang dilakukan pada deliverable 3 ini adalah (1) menyediakan informasi dasar kondisi sosial, ekonomi, dan gender pada wilayah studi, (2) mengidentifikasi indikator-indikator penting dalam pelaksanaan CCCD pada masa yang akan datang, dan (3) menyusun rekomendasi pelaksanaan kegiatan CCCD pada masa yang akan datang. Kajian ini melibatkan 113 responden rumah tangga di 7 dusun dan 6 industri rumah tangga. Data penelitian didapatkan melalui wawancara rumah tangga responden, *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi lapang. Analisis dilakukan dengan (1) metode deskriptif untuk kajian sosial ekonomi, (2) metode harvard untuk kajian gender, dan (3) metode KAP (*knowledge, attitude, dan practice*) untuk mengidentifikasi pemahaman masyarakat tentang *cross cutting issue* konvensi Rio.

Sub-DAS Way Khilau bersinggungan langsung dengan desa Bayas Jaya. Jumlah penduduk Desa Bayas Jaya adalah 986 KK atau 3897 jiwa yang terdiri dari 1942 laki-laki dan 1955 perempuan. Kepadatan penduduk di desa ini adalah 650 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga termasuk desa yang sangat padat. Dari total penduduk, 651 KK penduduk Bayas Jaya adalah penerima Rastra (Beras Sejahtera) yang menandakan 70% keluarga di desa ini masuk kategori kurang mampu.

Pendidikan masyarakat umumnya tamat SD dan sedikit yang tidak tamat SD. Namun demikian, walaupun sedikit, ada responden yang berpendidikan S1. Terdapat cukup banyak penduduk yang tidak punya lahan di lahan marga (33%) maupun tidak memiliki garapan di hutan lindung (58%).

Aktivitas ekonomi terbesar adalah pada sektor pertanian. Pendapatan rata-rata (data sementara) penduduk adalah Rp 550.419 per kapita per bulan. Sementara, pengeluaran rata-rata per kapita per bulan adalah Rp 567.300. Jadi ada gap sedikit antara pendapatan dan pengeluaran. Gap tersebut diduga ditutupi dengan kerja sebagai buruh tani maupun adanya bantuan beras pemerintah (rastra). Alokasi pengeluaran rumah tangga terbesar untuk pangan (46%) diikuti oleh transportasi, pendidikan, kesehatan, pembayaran listrik, dan pembelian sandang. Terdapat 7 KTH yang dibentuk tahun 2017 oleh KPHL Pesawaran. Lembaga ini masih baru dan butuh peningkatan kemampuan. Begitu juga Gabungan kelompok-kelompok tani (Gapoktan) dan kelompok wanita tani masih lemah kelembagaannya. Penguatan kelompok-kelompok tersebut menjadi langkah strategis yang harus dilakukan oleh proyek CCCD.

Perempuan berperan penting dan tak tergantikan untuk aktivitas rumah tangga domestik seperti mempersiapkan makanan, perawatan anak, pendidikan/sekolah anak. Perempuan berperan seimbang di pertanian bahkan dominan untuk pekerjaan pemetikan dan paska panen. Namun perempuan tidak memiliki posisi politik karena tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat dusun maupun desa. Bahkan, tidak ada pengurus desa (dusun) yang dijabat oleh perempuan.

*Illegal logging, illegal poaching*, maupun pengambilan burung masih terjadi walaupun sudah berkurang. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: pengawasan yang kurang oleh yang berwenang, petani menghindari masalah bila harus berhadapan dengan pelaku, harga komoditas kayu yang mahal khususnya sonokeling, harga daging (babi, rusa) yang juga mahal, harga burung yang juga mahal, dan selalu ada yang membeli.

Rekomendasi yang diajukan diarahkan untuk Kabupaten, Desa, Aspek-aspek Sosial, Ekonomi, dan Gender, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten, proyek melakukan pendampingan sosialisasi dan pelatihan mengimplementasikan pengarusutamaan gender dan anggaran responsive gender
2. Rekomendasi untuk desa: proyek melakukan (1) pendampingan menyusun peraturan desa terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan DAS, (2) melakukan penguatan/pendampingan untuk menjadi desa pro-klim, (3) menyusun prosedur penanganan bencana alam, dan (4) memfasilitasi pembentukan forum peduli sungai, air, dan hutan.
3. Untuk aspek sosial, direkomendasikan untuk: (1) melakukan pendampingan 3 KTH untuk menjadi HKM, (2) melakukan upaya menurunkan angka kemiskinan di bawah 10% pada akhir proyek melalui pelatihan ketrampilan non-pertanian, (3) melakukan pendampingan 3 KWT di 3 dusun agar menjadi lebih aktif, (4) memfasilitasi pelatihan untuk kelompok raja untuk meningkatkan kesadaran tentang 3 isu Konvensi Rio, (5) memfasilitasi pelatihan adaptasi perubahan iklim, (6) memfasilitasi demplot pengelolaan sumberdaya lahan berkelanjutan di dusun Cirompang dan Sinar Jaya, (7) membuat publikasi berupa buletin, Facebook, televisi, talkshow, (8) pelatihan pengelolaan limbah domestik untuk Dusun 1 (Bayas) dan Dusun 2 (Cong Kanan), (9) Pendamping pembentukan KTH baru di Dusun Sinarjaya, Serkung Sintuk, Serkung Tengos
4. Untuk aspek ekonomi, proyek direkomendasikan melakukan: (1) melakukan upaya peningkatan pendapatan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan agar terjadi peningkatan pendapatan 20%, (2) melakukan pelatihan peningkatan budidaya coklat yang baik, (3) melakukan peningkatan pendapatan non-farm, (4) melakukan pendampingan peningkatan pengelolaan jasa air bersih, (5) pendampingan pengembangan jasa ekowisata air terjun,
5. Untuk aspek gender, proyek direkomendasikan untuk (1) melakukan pendamping agar wanita tani mampu membangun usaha non-pertanian, (2) melakukan pendampingan untuk peningkatan peran perempuan dalam kelompok tani hutan dan kelompok tani reguler, (3) pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

## SUMMARY

Rio Convention produces 3 UN Conventions, i.e.: Convention on Biodiversity, Convention on Combating Desertification/Land Degradation, and Convention on Climate Change. These three conventions are linked to each other. The three UN Conventions needs implementation at local level. Although the three conventions have been rectified at national levels, at local levels the implementation is very limited. Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanisms for Sustainable Watershed/Land Management or CCCD project aims at implementing these three conventions at local and national levels as well.

Direktorat PEP DAS No 13/PEPDAS/P2DAS/KLN.0/3/2018 has directed that the project be implemented Sub DAS Way Khilau, Sub-DAS Bulok, DAS Sekampung, and is called Model DAS Mikro. Although small in area (600 ha), Sub-DAS Way Khilau plays important role in maintaining watershed in lower area (downstream).

Sub-DAS Way Khilau is overlapped with Bayas Jaya village with has population of 986 families, or 3897 people which consists of 1942 male and 1955 female. With its area of 525 ha, Bayas Jaya population density is then 650 population/km<sup>2</sup> which is considered high density. The population pressure on land is very high. This year, 651 families or more than 70% of Bayas Jaya population are receiving Rice for Welfare Program (Rastra) suggesting that the majority of the population in Bayas Jaya is considered poor.

The objective of the study included: (1) to prepare baseline information of socio-economics as well as gender status, (2) to identify significant indicators to be considered for CCCD project implementation, (3) to develop set of recommendation for CCCD project. This study involved 113 respondents from 7 hamlets and 6 household small scale industries. Data was collected through direct interview, *Focus Group Discussion* (FGD), and direct observation. The study employs (1) descriptive analysis for socio-economic data, (2) harvard approach for gender analysis, and (3) KAP (*knowledge, attitude, dan practice*) approach to understand community's knowledg, attitude and pratice on *cross cutting issue* of Rio Convention.

Level of education is generally low, completing and not completing elementary school. However, some few are able to complete undergraduate degree. Some population has no land (land less) whether in marga land or forest land.

Agriculture is the main source of income of family in Bayas Jaya. Cocoa farming is main source of income for most family in this village. Average monthly income per capita per month is Rp 550.419 whilst average monthly expenditure is Rp 567.300 per capita. This number suggests there is a slight gap between expenditure and income. Farmers may work as a farm labor and getting rice subsidy from government aid in order to match the gap. Main family expenditure is allocated for food (46%) followed with expenditures for transportation, education, health, electrical bill (just recently), and clothing.

In terms of farmers group, there are 9 forest farmer groups that were assisted and established by KPHL Pesawaran in 2017. These institutions are new and needed to be strengthened. One united farmers group or gapoktan with 6 farmers group as well as one women farmers group are also still weak and need for assistance. Srengthening these groups shall be a priority and strategic step for CCCD project.

Women plays very crucial and indespensible roles for domestic activities such as preparing meals, caring childred, taking care of education and health of children. Women is also plays equally important with men in agricultural activities, and even dominant in activities such as harvesting and post harvesting of choco farming. However, women has no political leverage in decision making process at hamlet or village levels. All village apparatus are male.

Illegal logging, illegal poaching, and bird hunting are still happened though intensity has been less. Several factors that drive the illegal activities, including: lack of patrol from authority, lack of community's participation as community avoids to have problem with the perpetrators, market price of

specific wood, price of deer and hog meat, price of birds, and above all there is always demand for such commodities from outside.

The study recommends 5 directions, i.e.: for Kabupaten/district, village, social, economic, and gender aspects. Details are as follows:

1. For Kabupaten level, the project should be assisted of socialization of PUG (Pengarusutamaan Gender) and ARG (Anggaran Responsive Gender).
2. For village, the study recommends that the project should (1) assist the development of village regulation on natural resources and watershed issues, (2) assist the village to become pro-climate village, (3) assist standard operating procedure on managing natural disaster, and (4) facilitate the creation of forums on river, water, and forest care,
3. For social aspect, the project should (1) assist 3 existing KTH to be Community Forest Group, (2) undertake non-farm skill trainings to reduce poverty level under 10% by the end of project, (3) assist 3 women groups to be more active, (4) facilitate training for youths to improve awareness of 3 Rio Conventions, (5) facilitate training on climate adaptation, (6) facilitate demplot on sustainable land management in Cirompang and Sinar Jaya hamlets, (7) produce publications to improve awareness of the 3 Rio Conventions, such as: producing bulletins, facebook fanpage, television and radio talkshow, (8) undertake training on domestic waste management in Hamlet 1 (Bayas) and Hamlet 2 (Cong Kanan), (9) assist the establishment of new KTH in Sinar Jaya, Serkung Sintuk, and Serkung Tengos hamlets,
4. For economic aspect, it is recommended that the project should (1) initiate activities that could increase family income by 20%, (2) undertake training on good agricultural practices of cocoa farming, (3) facilitate activities that could increase non-farm income, (4) assist improvement of community clean water services, (5) assist the development of ecotourism of waterfall.
5. For gender aspect, the study suggests that the project should (1) assist women to develop non-farm business, (2) assist the roles of women in KTH and regular farmers group, and (3) assist improvement of women participation in decision making process.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konvensi Rio menghasilkan 3 konvensi PBB yaitu Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi tentang Mengurangi Penggurunan/Degradasi Lahan, dan Konvensi tentang Perubahan Iklim. Ketiga konvensi tersebut terkait satu sama lainnya sehingga mereka sebenarnya merupakan satu kesatuan.

Implementasi Konvensi PBB (Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Degradasi Lahan) membutuhkan bukti nyata di tingkat tapak/lapang termasuk kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati, Program Rencana Aksi Nasional untuk Mengatasi Degradasi Lahan di Indonesia, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Inventarisasi Nasional GRK, Peraturan Pemerintah No 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Berbagai peraturan di tingkat sektoral pada kementerian seperti berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan Perhutanan Sosial juga merupakan salah satu upaya mendukung implementasi 3 Konvensi Rio. Dari sisi Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan mengeluarkan P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/ 2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, Dan Dampak Perubahan Iklim.

Kendati di tingkat nasional ketiga konvensi tersebut sudah diratifikasi serta dilanjutkan dengan undang-undang/peraturan pemerintah yang relevan, pada tataran daerah hal tersebut masih kurang. Di Provinsi Lampung, saat ini telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029. Dalam konteks rehabilitasi hutan dan lahan, Provinsi Lampung sejak tahun 2012 telah mencanangkan Gerakan Lampung Menghijau (Gelang) dengan sasaran pada lahan-lahan negara (Hutan Lindung, Konservasi) maupun pada lahan-lahan privat (marga).

Selain itu, dalam konteks Daerah Aliran Sungai, Provinsi Lampung telah mengundang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Lampung dan direvisi kembali pada tahun 2017 yang lalu dalam bentuk Revisi Perda DAS Lampung. Hanya saja, Perda tersebut belum diikuti oleh aturan operasional sebagai acuan pelaksanaan. Dengan demikian, pada masa yang akan datang, pelebagaan Perda DAS Lampung perlu digalakkan.

Inti dari pelaksanaan tiga konvensi PBB, pemerintah membutuhkan banyak strategi untuk menjadikannya membumi dan dipahami masyarakat luas maupun pemerintah daerah. Proyek *Capacity Development for Implementing Rio Conventions through Enhancing Incentive Mechanisms for Sustainable Watershed/Land Management (CCCD)* bertujuan agar ketiga isu konvensi tersebut dapat diimplementasikan pada skala daerah.



Proyek CCCD bertujuan untuk “*to strengthen targeted legal and regulatory frameworks as well as economic incentives to meet global environmental outcomes through sustainable watershed management*”.

Berdasarkan keputusan dari Direktorat PEP DAS No 13/PEPDAS/P2DAS/KLN.0/3/2018, implementasi proyek untuk di Provinsi Lampung yaitu di Sub Sub DAS Way Khilau, Sub-DAS Bulok, DAS Sekampung. Dari sisi luas, Sub Sub DAS ini hanya memiliki luas areal sekitar 680 ha. Oleh sebab itu, lokus kegiatan proyek CCCD (Cross Cutting Capacity Development) ada pada skala DAS Mikro atau dikenal dengan konsep Model DAS Mikro (MDM). Konsep Model DAS Mikro dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P. 15/V-Set/2009 tentang Pedoman Pembangunan Areal Model DAS Mikro menyatakan bahwa DAS Mikro adalah DAS dengan luas kurang dari 5.000 ha.

Salah satu komponen penting dalam MDM adalah perlunya penyajian informasi aspek sosial-ekonomi dan kebudayaan dari tapak MDM. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai data dasar sebelum dilakukan kegiatan pada areal MDM. Informasi dasar akan dijadikan sebagai benchmark evaluasi paska intervensi dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan terhadap DAS Mikro. Aspek gender dalam P. 15/2009 tidak secara eksplisit disebutkan. Hanya saja secara implisit disebutkan bahwa MDM harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga aspek gender masuk dalam konsteks “masyarakat”. Lebih jauh, P.15/2009 juga lebih menitik beratkan pada aspek rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka meningkatkan fungsi DAS. Aspek perubahan iklim dan biodiversity belum secara eksplisit dijadikan sebagai indikator pemilihan Model DAS Mikro. Berdasarkan hal tersebut, laporan ini akan mengintegrasikan cross cutting issue dalam rangka memberikan informasi dasar kondisi DAS Way Khilau dan memperkuat strategi intervensi proyek CCCD agar dapat tercapai outcome proyek yang diinginkan.

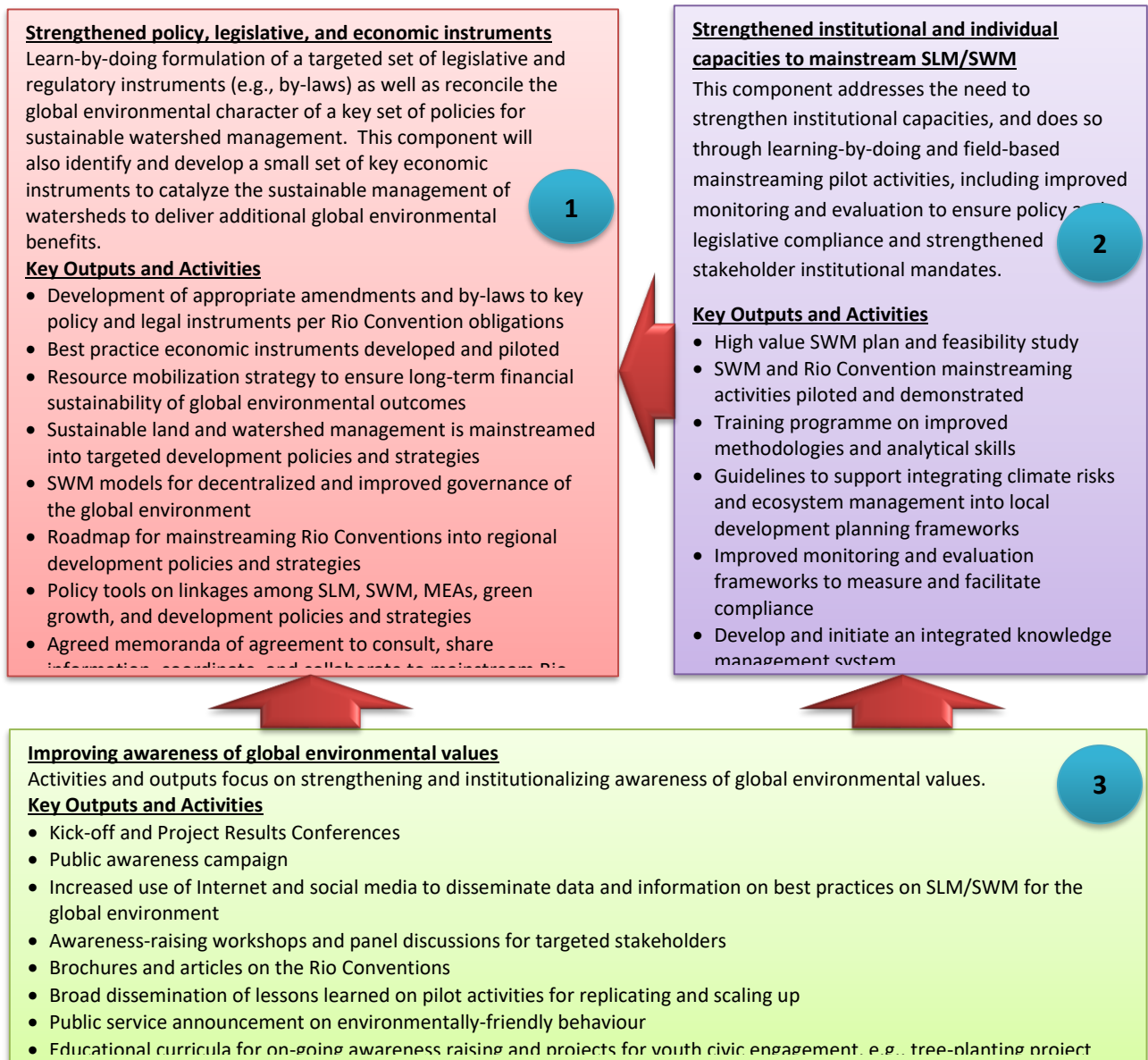
Laporan ini merupakan deliverable 3 atau Laporan Akhir. Isi Laporan Akhir ini merupakan *update* dari Laporan Deliverable 1 dan 2. Beberapa tambahan yang dilakukan meliputi penambahan detail informasi sosek per dusun dan tambahan informasi detail tentang hasil kajian KAP (*Knowledge, Attitude, and Practice*). Organisasi laporan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang akan terdiri dari latar belakang dan tujuan
2. Metode Penelitian yang memuat bagaimana penelitian dilaksanakan, dan metode analisis
3. Hasil Studi dan Pembahasan
4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
5. Lampiran-Lampiran

## 1.2 Desain Proyek CCCD

Proyek CCCD memiliki 3 output yang harus dicapai sesuai dengan Project Document proyek ini. Ketiga output itu meliputi: (1) Penguatan instrumen kebijakan, peraturan, dan ekonomi, (2) Penguatan lembaga dan perorangan dalam pengelolaan sumberdaya lahan dan daerah alirang sungai secara berkelanjutan, dan (3) Meningkatkan pemahaman nilai-nilai lingkungan skala dunia (*global environmental values*). Dengan demikian, kajian sosial-ekonomi dan gender akan memberikan rekomendasi dalam konteks pencapaian 3 output proyek.

Detail framework proyek tersaji pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Disain Proyek (Sumber: Project Document)

## 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan adalah

1. Menyajikan karakteristik penting pada aspek Sosial Ekonomi dan Gender
2. Menyediakan indikator indikator aspek sosial ekonomi dan gender yang dibutuhkan untuk indikator proyek CCCD
3. Menyediakan rekomendasi dalam rangka memberikan arahan pelaksanaan proyek CCCD

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Scoping dan model penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey namun dengan wilayah studi yang ditentukan secara sengaja yaitu Sub Sub DAS Way Khilau dengan Desa Bayas Jaya. Sub-Sub DAS Way Khilau sendiri memiliki luas area 680 ha dan Desa Bayas Jaya sekitar 525 ha yang masuk pada Sub sub Das Way Khilau.

### 2.2 Data dan informasi yang dikumpulkan

#### 1. Data Primer

Data primer didapat melalui aktivitas observasi lapang, diskusi tertentu, dan wawancara dengan responden. Panduan kuesioner untuk wawancara dan diskusi telah disiapkan oleh peneliti seperti terlampir pada Laporan 1 ini. Selain itu, peneliti bersama tim juga menggali informasi dan data melalui kegiatan *Focus Group Discussion* kepada kelompok remaja, ibu-ibu, kelompok tani hutan, dan pemerintah desa Bayas Jaya.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder didapat dari berbagai sumber yang terkait dengan lokasi Sub-Sub DAS Way Khilau seperti: a. data kependudukan, b. data luas dan alokasi lahan, c. data anggaran dan rencana pembangunan desa 2017, d. serta data lain yang relevan.

### 2.3 Responden

Responden adalah rumah tangga/individu yang bermukim ataupun menguasai/mengelola lahan di Sub-DAS Way Khilau. Responden tersebut terdiri dari: aparat pemerintah, petani, penggarap, pelaku industri rumah tangga, serta kelompok remaja. Ukuran responden adalah 119 responden yang terdiri dari responden rumah tangga sebanyak 113 dan industri rumah tangga sebanyak 6 keluarga. Penetapan responden per dusun dilakukan secara proporsional sesuai dengan populasi masing-masing dusun.

Responden didatangi berdasarkan pada grid (kotak) yang saat ini tim sudah susun. Dalam rencana studi, terdapat 30 kotak (grid) yang mewakili seluruh lansekap lokasi penelitian. Namun, mengingat sebagian grid tidak ada penghuni, maka prioritas grid yangtelah dikunjungi adalah grid yang bersinggungan dengan permukiman dan usahatani serta terkait dengan hutan lindung. Grid tersebut adalah 4, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 23 dan 24. Grid sasaran penelitian disajikan tersaji pada Gambar 1, Lampiran.

### 2.4 Metode Analisis

Tingkat analisis penelitian ini akan merujuk merujuk pada P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim. Dalam aturan tersebut, tingkat analisis dikelompok pada 4 kategori yaitu:

1. Tingkat tapak (lokasi tertentu pada MDM)
2. Tingkat mikro (tingkat desa lokasi MDM)
3. Tingkat meso (tingkat kabupaten dan provinsi)
4. Tingkat makro (nasional)

Penelitian ini akan fokus pada analisis tingkat 1 sampai dengan 3.

Alat analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

1. Analisis KAP (Knowledge, Attitude, dan Practice) dalam hubungannya dengan degradasi lahan, perubahan iklim, dan praktik yang dilakukan oleh responden dalam mengantisipasi tiga isu tersebut (best practice).
2. Analisis Gender  
Analisis gender dalam *project CCCD* di Sub-sub DAS Way Khilau mengadopsi pendekatan *Gender Analysis Framework (GAF)/Harvard approach*. Penggunaan kerangka GAF dinilai lebih cocok untuk perencanaan proyek dibandingkan dengan perencanaan program atau kebijakan dalam menentukan kebutuhan strategik gender (Overholt, Anderson, Cloud and Austin, 1985). Kerangka ini terdiri atas sebuah matriks yang mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga). Langkah GAF meliputi analisis profil kegiatan 3 (tiga) peran atau *triple roles* (terdiri atas peran publik dengan kegiatan produktifnya, peran domestik dengan kegiatan reproduktifnya dan peran kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya), profil akses dan kontrol, serta faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol.  
Tiga data set utama yang diperlukan:
  - a. Siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan? Hal ini dikenal sebagai “Profil Aktivitas”.
  - b. Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) atas sumber daya tertentu? Hal ini kerap dikenal dengan “Profil Akses dan Kontrol” Siapa yang memiliki akses dan kontrol atas “benefit” seperti produksi pangan, uang dsb.
  - c. Faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol yang ada pada “profil aktivitas” dan “profil akses dan kontrol”.

### III. HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Geografis dan Infrastruktur

Sub-DAS Way Khilau merupakan Sub-DAS yang kecil yaitu hanya seluas lebih kurang 600 ha. Sub-DAS ini sebagian besar bersinggungan dengan Desa Bayas Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran.

Desa Bayas Jaya merupakan desa pemekaran dari Desa Sukaraja, Kecamatan Kedondong. Saat ini, secara administratif, Desa Bayas Jaya masuk dalam Kecamatan Way Khilau. Desa Bayas Jaya berbatasan dengan: sebelah utara Desa Tanjung Kerta, sebelah selatan register 21, sebelah Timur Kec. Penengahan, dan Barat dengan Desa Babakan Loa.

Desa Bayas Jaya terletak lebih kurang 50 km dari Kota Bandar Lampung, dan sekitar 20 km dari Gedong Tataan, Ibukota Kabupaten Pesawaran. Waktu tempuh dari Bandar Lampung sekitar 90 menit dan dari Gedung Tataan sekitar 50 menit bila menggunakan kendaraan roda empat.

Desa Bayas Jaya memiliki 7 dusun yang terdiri dari Dusun Bayas, Cong Kanan, Lebak Damar, Cirompang, Serkung Sintuk, Sinar Jaya, dan Serkung Tengos. Tiga dusun terakhir memiliki akses jalan yang kurang baik. Aksesibilitas yang terburuk adalah pada Sinar Jaya (dusun 7) karena jalan menuju ke lokasi ini selain curam juga masih jalan tanah pemadatan dan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, saat musim hujan, wilayah ini akan sulit untuk diakses pun dengan kendaraan roda dua. Hal tersebut yang menyebabkan harga-harga barang primer (sembako) cukup mahal seperti gas melon (3 kg) harganya mencapai Rp 30.000 per tabung dimana harga barang yang sama di kota hanya sekitar Rp 20.000,00. Harga semen di Dusun Sinar Jaya dan Serkung Sintuk mencapai Rp 65.000 per zak terima di tempat sementara harga barang tersebut di desa induk hanya sekitar Rp 53.000—Rp 55.000 per zak.



Gambar 2. Kondisi jalan menuju Dusun Sinar Jaya

Infrastruktur jalan untuk mencapai desa ini sudah beraspal sampai dusun Lebak Damar. Namun, untuk menjangkau dusun-dusun lainnya seperti Cirompang, Sirtung Sintug, Sinar Jaya, SirtungTengos, dll harus menggunakan moda transportasi roda dua karena hanya tersedia fasilitas jalan yang buruk.

Untuk penerangan, sebagian besar wilayah Desa Bayas telah mendapatkan fasilitas listrik dari PT. PLN (Persero). Sedangkan infrastruktur telekomunikasi masih kurang baik karena wilayah ini tidak memiliki tower telekomunikasi sehingga sinyal telekomunikasi masih tidak stabil.

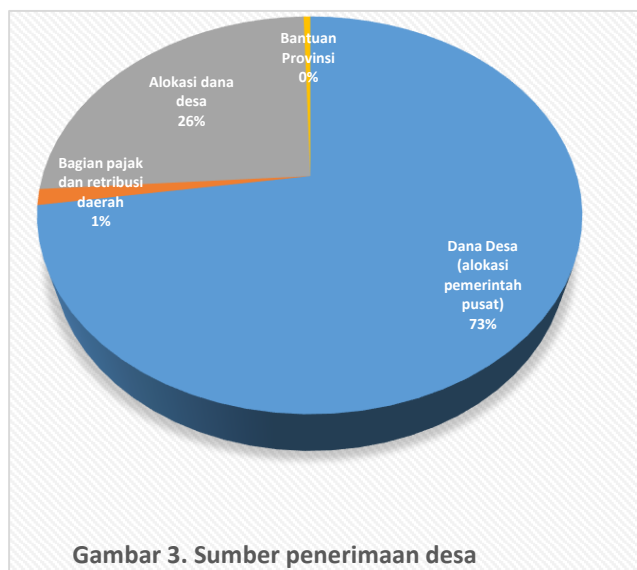
Dengan berlakunya Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Desa Bayas Jaya dapat menyusun kebutuhan anggaran dan belanja desa sesuai dengan aspirasi desa tersebut. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bayas Jaya tahun 2017, Desa Bayas

Jaya menganggarkan penerimaan sebesar Rp 1.172.172.027. Sumber penerimaan desa berasal tersaji pada Gambar 3 berikut ini.

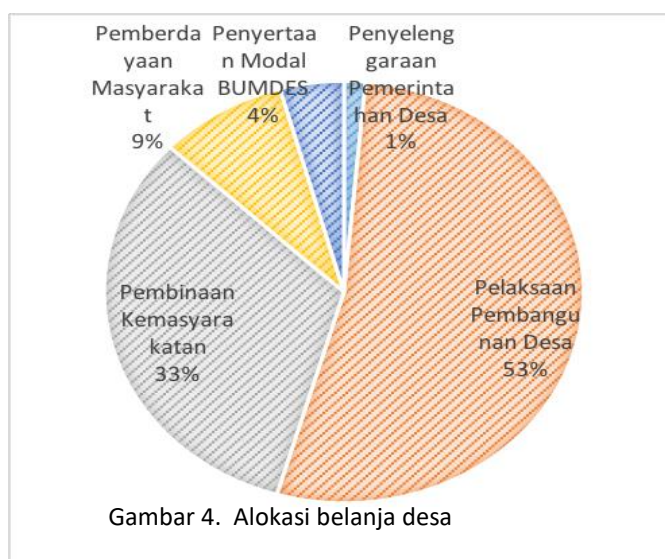
Dari gambar tersebut, sumber penerimaan utama Desa Bayas Jaya adalah dari pemerintah pusat berupa ADD yang mencapai 73% dari total penerimaan. Sehingga, seperti desa-desa lain di Indonesia, untuk saat ini desa sangat menggantungkan penerimaannya dari alokasi dana desa pemerintah pusat.. Sementara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten masih sangat kecil alokasi anggarannya untuk desa. Alasan klasik adalah pemerintah provinsi dan kabupaten juga memiliki anggaran yang terbatas untuk dialokasikan ke desa.

Dengan Undang-Undang tersebut, Desa Bayas Jaya juga memiliki hak untuk menyusun belanja desa sesuai dengan kebutuhannya. Gambar berikut ini merupakan rencana alokasi dana Desa Bayas Jaya, tahun anggaran 2017.

Alokasi belanja Desa Bayas Jaya terbesar adalah untuk pelaksanaan pembangunan yang melebihi 50% dari rencana engeluaran. Pelaksanaan pembangunan dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani, gedung balai desa, rehabilitasi fasilitas desa, dsb. Selanjutnya, rencana alokasi belanja terbesar kedua adalah untuk pembinaan kemasyarakatan yang dilenajutkan dengan renana pengeluaran untuk pemberdayaan masyarakat, fasilitasi BUMDES, dan terkecil untuk belanja pegawai desa (Gambar 4).



Gambar 3. Sumber penerimaan desa



Gambar 4. Alokasi belanja desa

### 3.2 Demografi

Jumlah penduduk Desa Bayas Jaya adalah 986 KK atau 3897 jiwa yang terdiri dari 1942 laki-laki dan 1955 perempuan. Sementara itu luas areal Desa Bayas Jaya adalah 525 ha sehingga, kepadatan penduduk di desa ini adalah 650 jiwa/km<sup>2</sup>. Menurut FAO (2009), kepadatan tersebut termasuk tinggi karena sudah melebihi 250 jiwa/km<sup>2</sup> dan menurut Undang-Undang No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, kepadatan tersebut termasuk kategori sangat padat karena melebihi 401 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan demikian, Desa Bayas Jaya memiliki tekanan penduduk terhadap lahan yang cukup tinggi.

Mayoritas penduduk Bayas Jaya adalah suku Sunda, lebih tepatnya Banten karena sebagian besar orang tua mereka berasal dari Provinsi Banten. Masyarakat Bayas Jaya yang aktif saat ini adalah generasi kedua dari keluarga pembuka lahan di wilayah ini. Pioneer pembukaan lahan adalah di awal tahun 1970an. Suku lain yang juga cukup besar komposisinya



adalah penduduk asli Lampung sub-ethnik Way Lima, Kedondong, Jawa, Semendo (Sumatera Selatan), dan berbagai suku lain.

Sebanyak 651 rumah tangga Desa Bayas, saat ini merupakan masyarakat penerima bantuan Rastra (Beras Sejahtera) dahulu dikenal dengan Raskin (Beras untuk rakyat miskin). Hal ini menggambarkan bahwa lebih dari 70% masyarakat Bayas Jaya masuk kategori tidak mampu sehingga mendapat subsidi beras Rastra.

### 3.3 Aktivitas Ekonomi

Sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan utama mayoritas penduduk Bayas Jaya. Usaha tani yang utama dilakukan oleh penduduk Bayas Jaya adalah perkebunan, khususnya coklat yang mencapai luas 360 ha atau 69% dari luas areal desa. Sebagai komoditas utama, coklat menyumbang lebih kurang 60-70% pendapatan rumah tangga penduduk desa ini. Dengan demikian, livelihoods penduduk desa sangat tergantung pada hasil dari budidaya coklat.

Sebagian Desa Bayas Jaya masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Register 21, yaitu seluas 275 ha atau sekitar 45% dari luas desa ini. Penduduk yang mengusahakan lahan di kawasan Hutan Lindung pun cukup besar. Di dusun Sinar Jaya yang memiliki jumlah keluarga sekitar 170 KK, hampir 70% memiliki lahan garapan dan menggantungkan hidupnya di hutan lindung. Usaha tani yang dilakukan di kawasan hutan lindung meliputi: penanaman pohon (kayu medang), penanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) seperti duren, kemiri, pinang, alpukat, dsb, namun dengan tanaman coklat atau kopi sebagai komoditas andalan. Pada areal hutan lindung, petani juga menanam tanaman pisang, jagung, padi gogo sebagai strategi penyediaan bahan pangan keluarga. Jadi pada areal hutan lindung sudah terbentuk struktur tajuk tinggi, sedang, dan rendah.

Sejak tahun 2017, KPH Kabupaten Pesawaran melakukan pendampingan kepada masyarakat penggarap kawasan hutan lindung dengan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH saat ini ada 9 kelompok, dan belum semua petani yang “menggarap” di hutan lindung telah membentuk kelompok. Tiap KTH memiliki anggota sekitar 20 petani.

Aktivitas KTH meliputi: (1) membantu pelaksanaan upaya-upaya rehabilitasi lahan dan hutan, (2) membuat areal pengamatan erosi berupa gulley erosion di dusun Serkung Sintuk, (3) membuat buku profil KTH dan di dalamnya sudah dilengkapi dengan peta wilayah kerja KTH, (4) mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan maupun BPDAS HL Way Seputih Way Sekampung. Saat ini KTH sedang dipersiapkan untuk menjadi kelompok kemitraan dengan KPHL dalam skema perhutanan sosial.

Sistem perkebunan di Bayas Jaya didominasi oleh perkebunan campuran yang mana dalam satu lokasi kebun terdapat lebih dari satu jenis tanaman dengan tanaman utama coklat/cacao. Kakao telah menjadi komoditas utama dalam 15 tahun terakhir. Sebelumnya, kopi dan pisang menjadi komoditas utama masyarakat, akan tetapi karena harga kopi yang jatuh di awal tahun 2000an serta serangan hama penyakit pada tanaman pisang, menyebabkan sebagian besar petani mengganti dengan tanaman coklat. Hal ini menggambarkan posisi strategis tanaman coklat bagi livelihood masyarakat.

Dalam budidaya pertanian, masyarakat Bayas Jaya hampir tidak menggunakan input luar untuk meningkatkan produksi perkebunan kakao dan tanaman lain. Masyarakat menyemai bibit kakao dan lainnya secara mandiri dan tidak menggunakan pupuk kimia (Urea, NPK, KCl dan lainnya), pestisida, dan herbisida. Alasan tidak menggunakan eksternal input adalah (1) biaya yang mahal, (2) modal kurang, (3) persepsi bahwa lahan masih produktif, (4) kurang paham tentang penggunaan input. Sebagai kompensasi ketiadaan eksternal input, sebagian masyarakat menjadikan limbah kulit kakao diperkebunan sebagai pupuk organik.

Aktivitas peternakan relatif terbatas yaitu peternakan unggas ayam pedaging, kambing, dan 1 usaha peternakan unggas burung puyuh. Sementara itu, walaupun potensi air cukup tersedia, hampir tidak dijumpai rumah tangga yang melakukan budidaya perikanan air tawar.

### 3.4 Karakteristik Responden terkait Sosek dan Gender

#### 3.4.1 Identitas responden

Mayoritas responden lahir di Bayas Jaya, kecuali untuk generasi pertama pemukim Bayas Jaya yang lahir sebagian dari Pandeglang (Banten), Madiun (Jawa Timur), maupun Way Lima (Kedondong, Lampung). Usia responden yang termuda adalah 25 tahun dan tertinggi 83 tahun. Rata-rata jumlah anggota per keluarga adalah 3,8 jiwa per keluarga.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan rendah yaitu SD dan SMP, walaupun ada sedikit yang berpendidikan S1 (strata 1).

Tabel 1. Persebaran responden berdasarkan usia dan pendidikan

Dusun	Usia		Pendidikan	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
Bayas Jaya	30	60	SD	S1
Cong Kanan	27	83	SD	SMP
Lebak Damar	24	73	TS	SD
Cirompang	25	70	TS	SD
Serkung Sintuk	27	50	SD	MAN
Serkung Tengos	34	50	SD	SMA
Sinar Jaya	28	53	SD	SMA

Sumber: data primer diolah, 2018

#### 3.4.2 Aktivitas Usahatani

##### 1. Penguasaan lahan pertanian dan kehutanan

Penguasaan lahan terdiri dari penguasaan lahan privat atau marga dan lahan kawasan atau lahan hutan lindung. Pemilikan lahan marga berkisar antara 0 s.d. 6 ha. Sebanyak 33% responden tidak memiliki lahan di lahan marga (*land less*). dan 58% tidak punya garapan di kawasan hutan lindung. Dengan demikian, 42% petani responden adalah penggarap di hutan lindung.

Di sisi lain, sekitar 42% petani di Dusun Cirompang, Sinar Jaya, Sirtung Sintuk, Sirkung Tengos memiliki garapan di hutan lindung dengan luasan dari 1 s.d. 5 ha. Sedangkan sisanya, 58% tidak memiliki garapan di hutan lindung.

Perhatian serius perlu dilakukan untuk petani tak punya lahan. Dengan jumlah yang cukup banyak mencapai lebih dari 30%. Sustainable livelihoods berbasis non-pertanian perlu untuk dikembangkan di lokasi proyek.



Tabel 2. Penguasaan lahan responden

Dusun	Milik sendiri (ha)		Kawasan (ha)	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
Bayas Jaya	0	3	0	2
Cong Kanan	0	2	0	5
Lebak Damar	0,015	1	1	2
Cirompang	0,025	3	1	2
Serkung Sintuk	0	6	0	2
Serkung Tengos	0	3	0	1
Sinar Jaya	0	2,5	0	4

Sumber: data primer diolah, 2018

Aktivitas usaha tani di lahan marga atau milik sendiri lebih intensif dibandingkan pada garapan di hutan lindung. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepastian usaha pada lahan marga lebih tinggi dibandingkan pada hutan lindung.

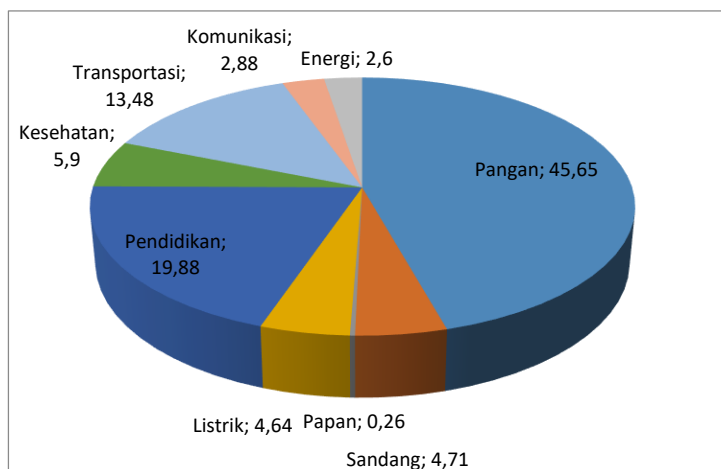
Hasil tabulasi sementara menunjukkan banyak petani responden yang masuk kategori *landless* (tidak memiliki lahan) baik lahan sendiri atau hutan lindung. Kelompok masyarakat ini masuk kategori miskin dan tentunya butuh perhatian serius pemerintah.

### *Pendapatan dan Pengeluaran*

Hasil tabulasi terhadap 113 responden penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan bersih rata-rata rumah tangga per bulan adalah Rp 1.588.439. dan per kapita adalah Rp 550.419. Pendapatan bersih per bulan terendah rumah tangga adalah Rp 421.250 dan per kapita Rp 106.250. Sementara pendapatan bersih tertinggi rumah tangga adalah Rp 8.693.333 dan per kapita Rp 2.791.666 per bulan. Sumber pendapatan rumah tangga adalah dari usahatani 78% dan non-usahatani 22%. Usahatani yang dominan adalah usahatani coklat dan usahatani kopi.

Pengeluaran rata-rata rumah tangga per bulan adalah Rp 1.887.748. dan pengeluaran rata-rata per kapita adalah Rp 567.300 per bulan. Sementara itu, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan terendah adalah Rp 560.000 atau pengeluaran per kapita Rp 168.791 per bulan. Pengeluaran rata-rata tertinggi keluarga per bulan adalah Rp 5.208.750 dan per kapita Rp 2.552.000 per bulan. Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk berbagai keperluan seperti pangan, sandang, papan, dsb disajikan pada Gambar 5.

Berdasarkan pendekatan pengeluaran rumah tangga, terdapat 19 responden (17%) rumah tangga yang masuk kategori miskin menurut standar pengeluaran Kabupaten Pesawaran tahun 2017.



Gambar 5. Alokasi pengeluaran rumah tangga (Sumber data primer diolah)

Mereka seluruhnya adalah penerima program bantuan beras sejahtera pada tahun 2018 ini.

### 3.5 Kajian KAP (Knowledge, Attitude, and Practice) untuk Cross Cutting Issue

#### 3.5.1 Pengetahuan untuk cross cutting issue

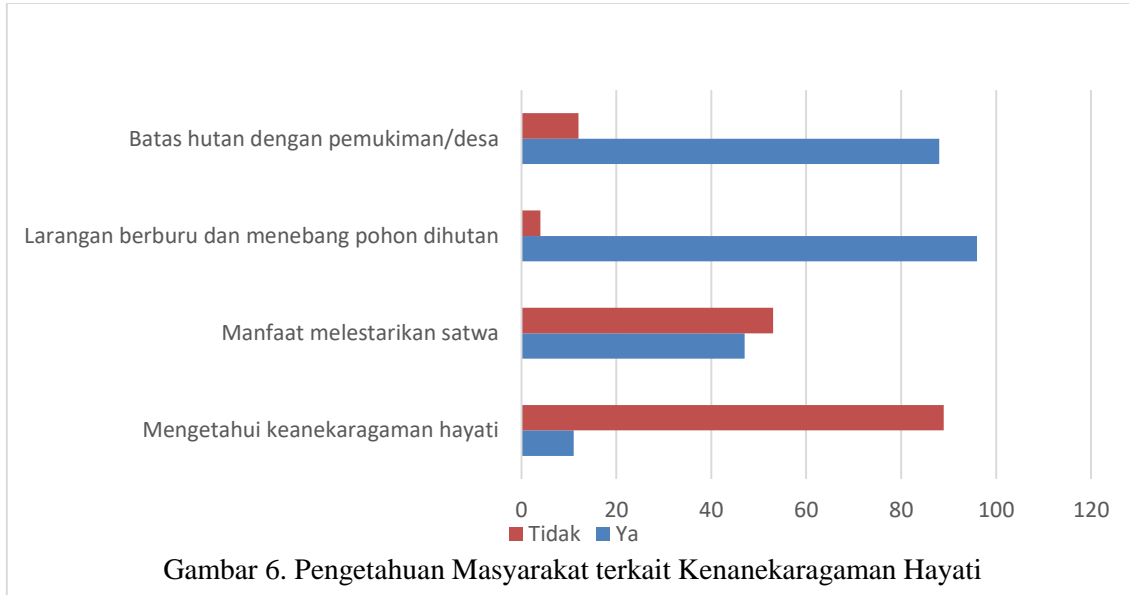
Pengetahuan masyarakat terhadap perubahan iklim umumnya berkaitan dengan peningkatan suhu disiang hari. Aspek pengetahuan dalam keanekaragaman hayati dan degradasi lahan, masyarakat memahami dengan baik jenis flora dan fauna yang dilarang untuk ditebang dan ditangkap, serta manfaat dari perkebunan tumpang sari yang menjaga erosi dan banjir.

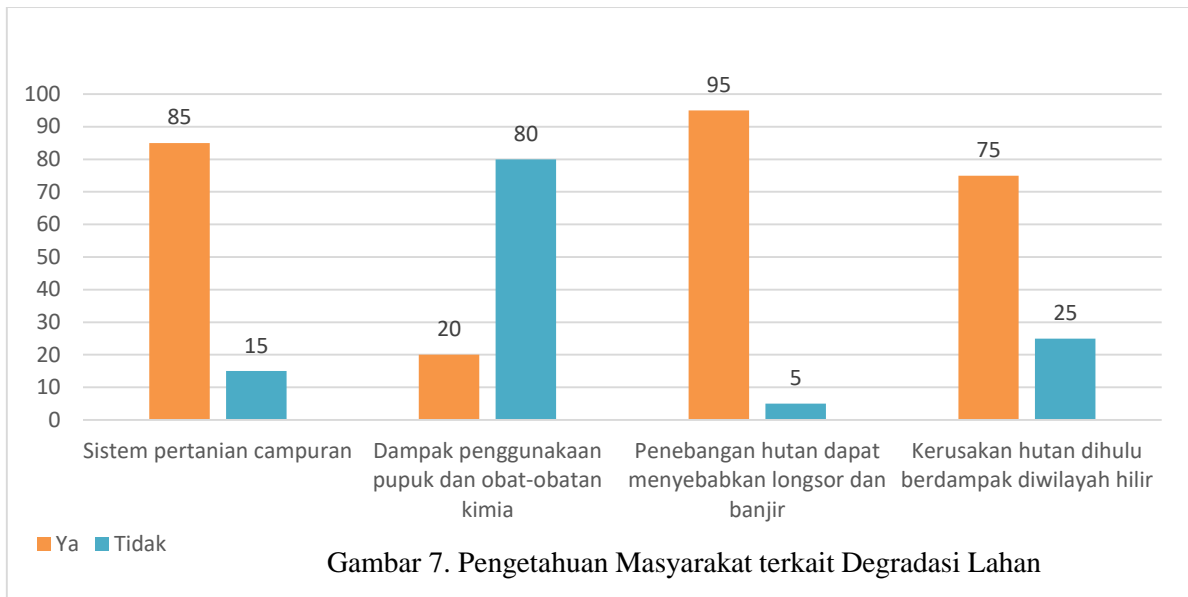
Pengetahuan dalam Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Degradasi Lahan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Pengetahuan responden untuk *cross cutting issue*

Klasifikasi	Pertanyaan/pernyataan tentang pengetahuan	Respon responden
Perubahan iklim	Kesadaran dalam perubahan Iklim	12 persen tidak menyadari perubahan iklim. Artinya sebagian besar responden penelitian (99 responden atau 87,61 persen) telah menyadari perubahan iklim.  Hampir keseluruhan responden menyadari bahwa telah terjadi perubahan iklim dalam lima tahun terakhir.
	Indikasi perubahan iklim	Indikasi perubahan iklim yang dirasakan responden berupa: 1. Perubahan suhu yang meningkat 2. Debit dan kekeruhan sungai 3. Musim penghujan yang berubah
	Perubahan produktivitas tanaman perkebunan	Indikasi perubahan iklim berpengaruh pada aktivitas perkebunan masyarakat, melalui satunya peningkatan serangan hama dan perununa produksi perkebunan yan berkisar 5 sampai dengan 50 persen.
Keanekaragaman hayati	Mengetahui keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 persen tidak mengetahui konsep keanekaragaman hayati</li> <li>• 89 persen responden mengetahui konsep keanekaragaman hayati</li> </ul>
	Manfaat melestarikan satwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 persen mengetahui manfaat melestarikan satwa</li> <li>• 53 persen tidak mengetahui manfaat melestarikan satwa</li> </ul>
	Larangan berburu dan menebang pohon di hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 persen mengetahui Larangan berburu dan menebang pohon di hutan</li> <li>• 3,54 persen tidak mengetahui larangan berburu dan menebang pohon di hutan</li> </ul>
	Batas hutan dengan pemukiman/desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 persen mengetahui batas hutan dengan pemukiman/desa</li> </ul>

Klasifikasi	Pertanyaan/pernyataan tentang pengetahuan	Respon responden
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 persen tidak mengetahui batas hutan dengan pemukiman/desa</li> </ul>
Degradasi lahan	Sistem pertanian campuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85 persen mengetahui sistem pertanian campuran</li> <li>• 15 persen tidak mengetahui sistem pertanian campuran</li> </ul>
	Dampak penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 persen mengetahui dampak penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia terhadap tanah</li> <li>• 80 persen tidak mengetahui dampak penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia terhadap tanah</li> </ul>
	Penebangan hutan dapat menyebabkan longsor dan banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 persen mengetahui keterkaitan antara penebangan hutan dengan longsor dan banjir</li> <li>• 5 persen tidak mengetahui keterkaitan antara penebangan hutan dengan longsor dan banjir</li> </ul>
	Kerusakan hutan dihilir berdampak diwilayah hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 persen mengetahui keterkaitan antarakerusakan hutan dihilir dan dampaknya diwilayah hilir</li> <li>• 25 persen tidak mengetahui keterkaitan antarakerusakan hutan dihilir dan dampaknya diwilayah hilir</li> </ul>





### 3.5.2 Sikap dalam Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Degradasi Lahan

Aspek sikap dalam perubahan iklim, secara umum responden penelitian telah memahami bahwa telah terjadi perubahan iklim yang berdampak pada pertanian (dalam hal ketersediaan air, intensitas dan curah hujan). Masyarakat setuju jika perubahan iklim berkaitan dengan banjir dan longsor. Meskipun demikian secara pemahaman, masyarakat masih belum memahami secara baik terkait perubahan iklim.

Dalam aspek keanekaragaman hayati, 88% tidak setuju dengan perburuan satwa dan illegal logging, mereka memahami bahwa kegiatan perburuan satwa dan *illegal logging* adalah dilarang. Dan 85 persen setuju dengan perlindungan satwa dan hutan. Meskipun demikian, 65 persen setuju dengan kegiatan perkebunan didalam hutan, meskipun perkebunan didalam hutan telah merusak hutan, ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadi alasan masyarakat setuju dengan perkebunan didalam hutan.

Untuk aspek Degradasi Lahan, sebagian besar responden tidak menggunakan pupuk dan pestisida dalam kegiatan pertanian dan perkebunan 91 persen tidak tahu. Kemudian, sebagian besar masyarakat setuju dengan sistem perkebunan campuran (*agroforestry*) dan kurang setuju dengan sistem pertanian/perkebunan monokultur.

Praktis *agroforestry* sudah berkembang di beberapa lokasi di dusun Cong Kanan, Dusun Bayas Jaya, Dusun Cirompang, dan Dusun Lebak Damar.

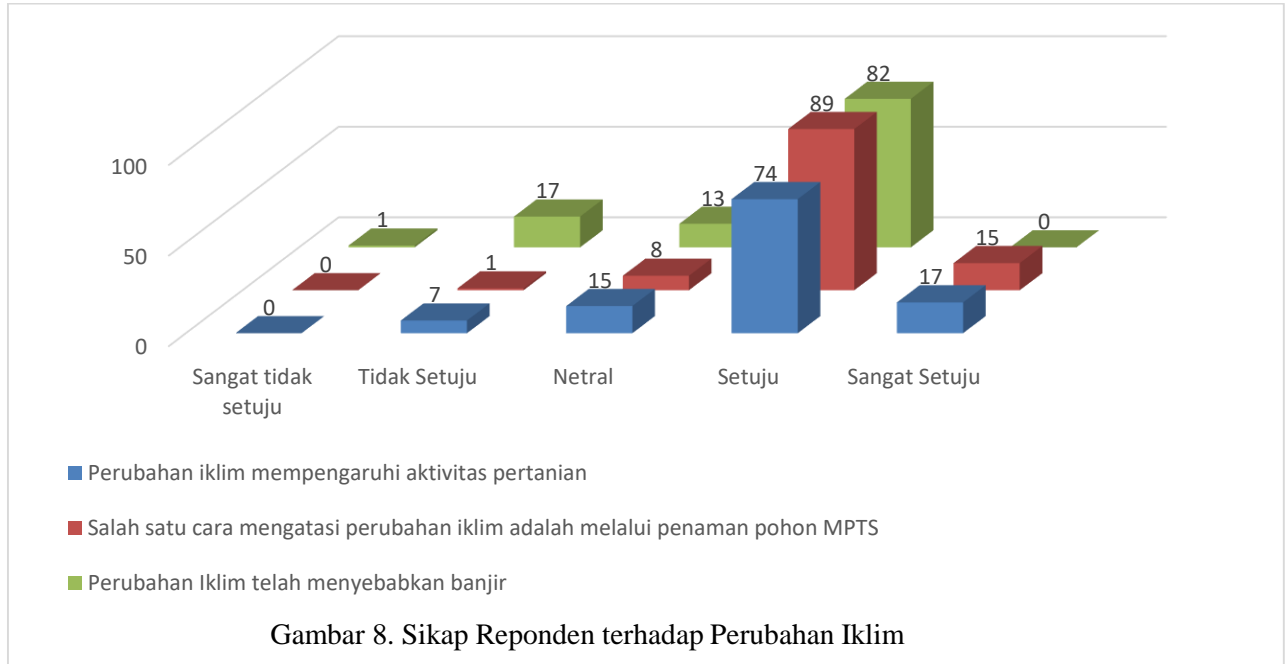
Tabel 4. Sikap masyarakat dalam *cross cutting issue*

Aspek	Pernyataan	Sikap*					Σ
		1	2	3	4	5	
Perubahan Iklim	Perubahan iklim mempengaruhi aktivitas pertanian	0	7	15	74	1	113
	Salah satu cara mengatasi perubahan iklim adalah melalui penanaman pohon MPTS	0	1	8	89	1	113
	Perubahan Iklim telah menyebabkan banjir	1	17	13	82	0	113
Keanekaragaman hayati	Penebangan hutan/illegal logging dan perburuan satwa	10	99	3	0	1	113
	Aktivitas perkebunan di dalam hutan	0	1	38	73	1	113
	Perlindungan hutan dan satwa	0	0	14	96	3	113
	Sistem pertanian/perkebunan monokultur	0	57	32	23	1	113
	Sistem pertanian <i>agroforestry</i> /campuran	0	5	11	88	9	113

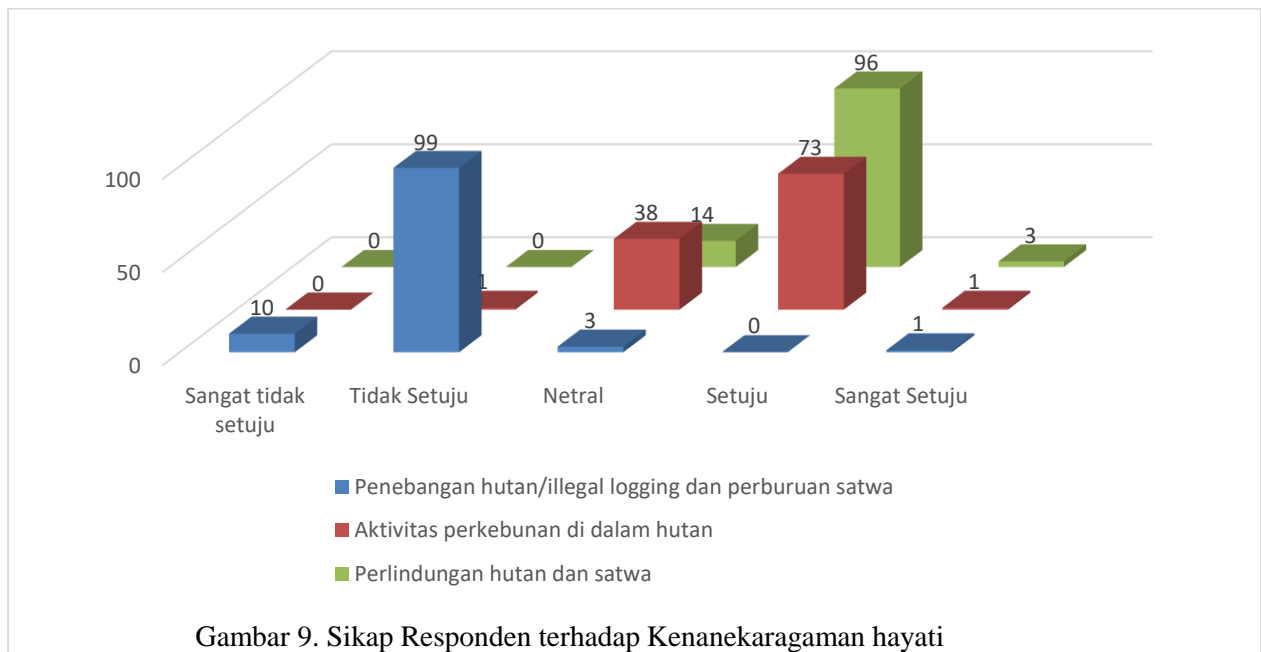
Degradasi Lahan/Konservasi lahan	Penggunaan pupuk dan obat-obatan kimia	0	10	55	48	0	113
	Penanaman pohon mampu mencegah erosi lahan	0	4	3	103	3	113

Keterangan\*

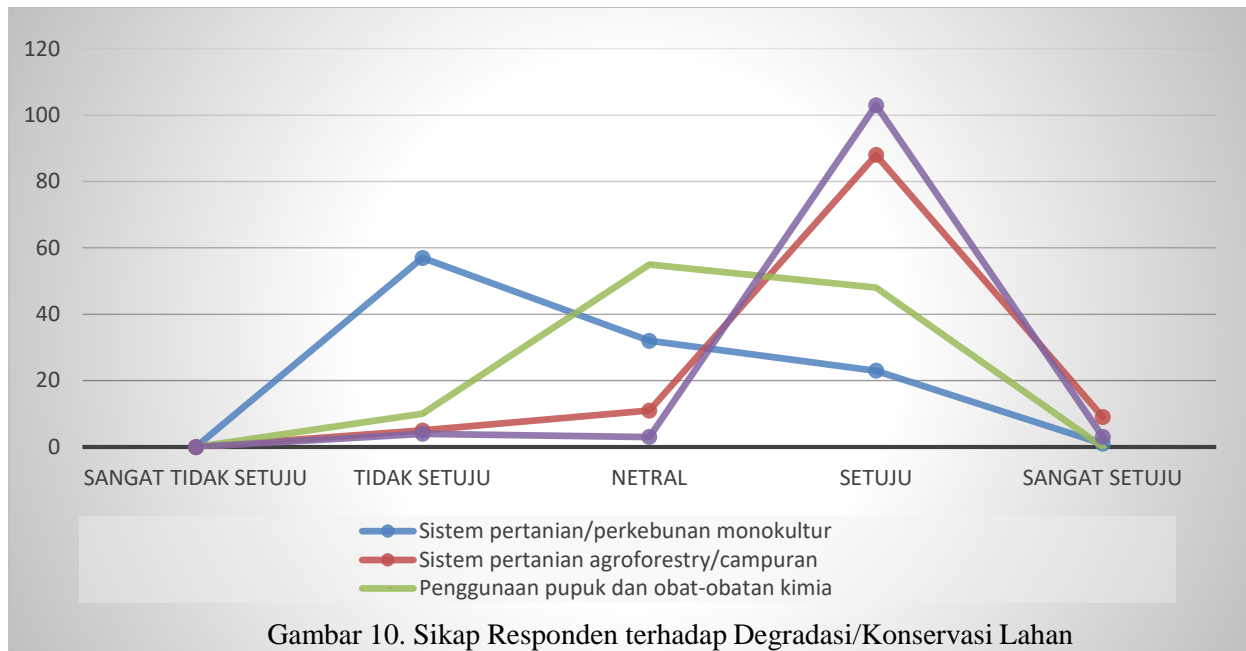
- 1= Sangat tidak setuju,
- 2= Tidak setuju,
- 3= Netral/tidak tahu,
- 4= Setuju,
- 5= Sangat setuju



Gambar 8. Sikap Reponden terhadap Perubahan Iklim



Gambar 9. Sikap Responden terhadap Kenanekaragaman hayati



Gambar 10. Sikap Responden terhadap Degradasi/Konservasi Lahan

### 3.5.3 Practice dalam Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Degradasi Lahan

Mayoritas responden tidak melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atas perubahan iklim dan belum adanya penyuluhan khusus tentang aspek perubahan iklim. Di sisi lain, upaya kolektif masyarakat belum pernah dilakukan. Dalam konteks perlindungan satwa dari illegal poaching, masyarakat belum melakukan upaya yang perlindungan satwa. Bahkan masyarakat enggan melaporkan kejadian pelanggaran keanekaragaman hayati.

Tabel 5. Praktik masyarakat dalam perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan kerusakan lahan.

Aspek	Adaptasi	Penjelasan
Perubahan Iklim	Melakukan adaptasi perubahan iklim	95 persen responden tidak melakukan adaptasi dalam perubahan iklim.
	Pencegahan perubahan iklim ditingkat kolektif	Ditingkat masyarakat, belum ada upaya kolektif dalam pencegahan perubahan iklim.
Keanekaragaman hayati	Perlindungan satwa dan hutan	88,5 persen tidak melakukan perlindungan satwa dan hutan. Sebanyak 11,5 persen melakukan perlindungan satwa dan hutan dengan memperingatkan pemburu satwa dan pelaku yang melakukan illegal logging.
	Program penanaman pohon pada hutan oleh masyarakat	94 responden atau 83,18 persen responden melakukan penanaman pohon baik yang diinisiasi oleh pihak kehutanan atau penanaman pohon di lahan marga dan hutan yang digarap oleh masyarakat. Tingginya responden yang melakukan penanaman pohon di hutan karena lebih dari setengah responden memiliki kebun di hutan dan berkebun tanaman tahunan.
	Upaya kolektif ditingkat masyarakat dalam perlindungan keanekaragaman hayati	101 atau 89,38 persen responden mengaku bahwa belum ada upaya kolektif masyarakat dalam perlindungan <i>biodiversity</i> . Meskipun demikian, 12 atau 10,62 persen responden mengaku bahwa telah ada

Aspek	Adaptasi	Penjelasan
		aturan tidak tertulis terkait larangan penebangan dan perburuan satwa didalam hutan.
Degradasi Lahan/Konservasi lahan	Adaptasi dalam mencegah degradasi lahan	92 responden atau 81,41 persen responden penelitian tidak melakukan adaptasi degradasi lahan, hanya 21 atau 18,59 persen responden yang melakukan adaptasi dalam degradasi lahan. Jenis adaptasi yang dilakukan oleh responden adalah melalui perkebuna campuran/ tumpangsari dikebun baik dilaan marga atau kawasan hutan.
	<i>Illegal logging</i>	Hanya 16,81 persen responden yang mengaku bahwa telah terjadi <i>illegal logging</i> . Meskipun demikian, responden lebih memilih membiarkan proses dan pelaku <i>illegal logging</i> dengan alasan keamanan. Pelaku <i>illegal logging</i> biasanya bekerjasama dengan pihak tertentu yang berasal dari desa Bayas Jaya dan juga aparat pemilik kekuasaan.
	Upaya kolektif ditingkat masyarakat dalam degradasi lahan	Secara keseluruhan, belum ada upaya masyarakat ditingkat kolektif dalam kegiata konservasi dan penanggulangan degradasi lahan. Hal ini ditandai dari hasil wawancara yang mana hanya 3,53 persen (empat) responden yang mengaku terdapat upaya kolektif penanggulangan degradasi lahan.

Dalam konteks pengelolaan degradasi lahan, seluruh responden belum melakukan upaya kolektif pengendalian degradasi lahan. Namun, secara individual responden melakukan upaya individual untuk pengendalian degradasi lahan dengan mengembangkan model wanatani (lihat pada Sub-bab 3.9)

### 3.6 Kajian Gender

Pada tataran kebijakan, Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Sejak diundangkan, beberapa aktivitas telah diimplementasikan diantaranya pembentukan Focal Point atau Gugus Kerja PUG yang diketuai oleh Gubernur Lampung.

Sebagai kelanjutan Perda tersebut, Gugus Kerja PUG sudah melakukan sosialisasi kepada OPD dalam rangka pelaksanaan PUG dalam bentuk PPRG (Perencanaan Pembangunan Responsive Gender) dan dilanjutkan dengan ARG (Anggaran Responsive Gender). Menurut diskusi dengan para pihak, sudah ada 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang telah melaksanakan PPRG dan ARG. Sedangkan 19 OPD belum melaksanakan PPRG dan ARG.

Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah menerbitkan Peraturan Bupati No 15 tahun 2018 tanggal 27 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Peraturan Bupati yang baru tersebut telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada kecamatan dan OPD di tingkat kabupaten. Sebagai kelanjutan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak saat ini sedang mempersiapkan SK Bupati tentang focal point dan gugus tugas pengarusutamaan gender Kabupaten Pesawaran. Hanya saja, peraturan daerah untuk PUG belum disusun dan belum masuk dalam prioritas legislasi di Kabupaten Pesawaran.

Di tingkat desa, sebenarnya dalam RKP Desa Bayas Jaya, sudah dicantumkan jumlah penerima manfaat laki dan perempuan dalam aktivitas pembangunan. Namun, hal tersebut belum secara riil dilaksanakan di lapang.

Hasil FGD bersama kelompok perempuan dapat disimpulkan bahwa: perempuan merupakan pekerja “borongan” yang artinya perempuan melakukan seluruh aktivitas rumah tangga dan usahatani keluarga. Dalam kegiatan rumah tangga dalam hal ini masak dan mengurus rumah, perempuan memegang peran penuh. Suami hanya membantu kegiatan rumah tangga dengan kontribusi yang sedikit. Karena didominasi perkebunan kakao, perempuan berperan besar dalam penjemuran biji kakao. Pemanenan dilakukan oleh pihak laki-laki. Komoditas perkebunan yang mendominasi di Bayas Jaya menyebabkan tidak ada kegiatan pengolahan tanah, pemupukan, penyiangan dan lainnya.

Dari sisi upah kerja, perempuan umumnya mendapat upah yang sedikit lebih rendah (Rp 60.000-65.000) dibandingkan laki-laki yang mendapat upah Rp 75.000 s.d. Rp 80.000 per hari ditambah benefit berupa disediakan snack dan konsumsi khususnya untuk pekerja konstruksi. Perempuan umumnya bekerja upahan saat panen coklat sedangkan laki-laki mendapat upah dari pengolahan tanah dan konstruksi bangunan/tukang.

Dalam konteks akses pendidikan, perempuan dan laki memiliki akses pendidikan yang sama yang dibuktikan dengan komposisi yang seimbang antara laki-laki pada *school enrollment* di Desa Bayas Jaya. Berdasarkan data Profil Desa Bayas Jaya, 2014, dapat dilihat jumlah pelajar/mahasiswa Desa Bayas Jaya adalah 2991 pelajar/mahasiswa dengan komposisi 49% laki laki dan 51% perempuan.

Untuk akses pada program pemerintah, sebagian besar penerima manfaat program pemerintah adalah laki-laki melalui kelembagaan kelompok tani (mayoritas laki) dan KTH (mayoritas laki-laki). Ada 1 kelompok wanita tani yang terdaftar di desa namun aktivitasnya tidak menonjol/tidak ada aktivitas.

Terkait dengan property rights, kepemilikan lahan umumnya atas nama laki-laki dibandingkan perempuan. Umumnya responden wanita tidak mengetahui jumlah lahan yang mereka kelola, karena hal tersebut dipercayakan pada laki-laki.

Dari struktur pemerintahan desa, seluruh dusun dipimpin oleh laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Desa Bayas Jaya memiliki tipikal model gender di Indonesia dimana laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan perempuan.

Kajian gender lebih lanjut menyusun profil aktivitas masyarakat yaitu aktivitas produksi dan reproduksi. Dalam aktivitas produksi (pertanian/perkebunan, buruh/pekerjaan dan industri rumah tangga) perempuan ikut terlibat, tetapi tingkat aktivitasnya dibawah laki-laki. Aktivitas reproduksi/domestik yang berkaitan dengan aktivitas rumah tangga (menyiapkan makanan, mengurus rumah, anak dan sebagainya) hanya perempuan yang terlibat. Sedangkan aktivitas energi, pengambilan air, memperbaiki rumah, dan jual beli komoditas pertanian laki-laki lebih berperan dibanding perempuan. Ringkasan profil aktivitas berdasarkan kajian gender tersaji pada Tabel 6 berikut.

Dari tabel tersebut, aktivitas-aktivitas pengolahan tanah dan penggunaan pestisida hanya lelaki yang melakukan. Namun untuk aktivitas-aktivitas penyiapan makanan, asuh anak, belanja ke pasar, perempuan lebih dominan.

Tabel 6. Analisis gender tentang profil aktivitas di Sub-sub DAS Way Khilau

Aktivitas	Perempuan	Laki-laki
Aktivitas produksi		
• Pertanian/Perkebunan		
1. Pengolahan tanah	0	1
2. Penanaman	1	2
3. Pemupukan	1	2
4. Penyiangan/penyemprotan	0	1
5. Pemanenan	1	1
6. Penjemuran	1	1
• Pekerjaan/Buruh	1	2



Aktivitas	Perempuan	Laki-laki
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peternakan</li> <li>• Perikanan</li> <li>• Industri rumah tangga</li> </ul>	0 0 1	0 0 1
Aktivitas reproduksi/domestik	1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengambil air</li> <li>• Pemenuhan energi KK (kayu bakar)</li> <li>• Penyiapan makanan</li> <li>• Menyiapkan pakaian</li> <li>• Menjaga anak</li> <li>• Kesehatan</li> <li>• Membersihkan rumah</li> <li>• Memperbaiki rumah</li> <li>• Belanja/jual di/ke Pasar kebutuhan RT</li> <li>• Belanja/jual komoditas usahatani</li> </ul>	1 1 1 1 1 1 1 0 1 1	2 2 0 0 0 1 0 1 0 2

Keterangan:

0:0 (Keduanya tidak ada aktivitas); 0:1 (Salah satu pihak berperan/terlibat dan lainnya tidak); 1:1 (Keseimbangan aktivitas dan peranan); 1:2 (Salah satu pihak berperan lebih)

Bagian kedua, akses dan kontrol atas sumberdaya dan benefit antara perempuan dan laki-laki di Desa Bayas Jaya memperlihatkan bahwa akses perempuan dan laki-laki dalam sumberdaya alam cenderung seimbang, tetapi kontrol laki-laki terhadap sumberdaya lebih dominan. Aspek sosial masyarakat, akses perempuan dan laki-laki seimbang, tetapi kontrol laki-laki dalam hak sosial kemasyarakatan lebih dominan dibandingkan perempuan. Ringkasan kajian gender pada akses dan kontrol atas sumberdaya dan sosial kemasyarakatan tersaji pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Profil Akses dan Kontrol atas sumber daya dan sosial kemasyarakatan di Sub-DAS Way Khilau

	Akses		Kontrol	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Sumber daya				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah</li> <li>• Alat produksi</li> <li>• Cash/uang</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Pelatihan</li> <li>• Tabungan</li> </ul>	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 1	1 1 1 1 1 1	2 2 1 2 2 1
Benefit				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Aset</li> <li>• Sumber pendapatan</li> <li>• Kebutuhan dasar</li> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kekuasaan politis dalam sosial masyarakat</li> </ul>	1 1 1 1	1 2 1 1	1 1 1 1	2 2 1 2
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat dalam kelompok sosial</li> <li>2. Menyampaikan pendapat/suara</li> <li>3. Jabatan dalam masyarakat</li> <li>4. Hak memilih dan dipilih</li> </ol>	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	2 2 2 2

Keterangan:

0:0 (Keduanya tidak ada aktivitas); 0:1 (Salah satu pihak berperan/terlibat dan lainnya tidak); 1:1 (Keseimbangan aktivitas dan peranan); 1:2 (Salah satu pihak berperan lebih)

### 3.7 Kearifan lokal, property rights, dan persepsi terhadap lingkungan

Mayoritas warga Desa Bayas adalah suku Sunda Banten. Kearifan lokal yang diyakini oleh masyarakat Desa Bayas sangat kuat dipengaruhi oleh hal-hal yang diturunkan oleh kearifan suku Banten, khususnya dalam konteks kehidupan ekonomi, hubungannya dengan sumberdaya alam seperti air dan hutan, maupun flora dan fauna, dan praktik-praktik pertanian.

Kearifan lokal tersebut tertanam kuat pada generasi tua (pioneer) yang datang ke Desa Jaya pada akhir tahun 60an dan awal tahun 70an. Beberapa hal yang masih dipegang oleh masyarakat Bayas Jaya sampai saat ini seperti: (1) ajaran melarang warga untuk menebang kayu pada areal sekitar sumber mata air, lereng, dan tanah lunak. Norma ini, masih diwariskan oleh generasi masyarakat Bayas Jaya saat ini. Menurut masyarakat, hutan tempat sumber mata air berada harus dijaga agar pasokan air untuk keluarga dan anak cucu dapat tetap terjamin. (2) tradisi untuk menanam pohon pengganti bila masyarakat menebang kayu untuk kebutuhan sendiri seperti untuk membangun rumah. Penggantian ini dirumuskan oleh tetua masyarakat dan diwariskan kepada generasi saat ini. (3) tradisi gotong royong saat masyarakat untuk membangun rumah, saat mengalami musibah seperti kematian, dan ketika membuat fasilitas umum seperti mushalla, jalan umum.

Dalam konteks kawasan hutan, masyarakat mengetahui dengan cukup baik batas hutan negara dengan lahan marga serta manfaat menjaga kelestarian hutan bagi masyarakat. Menurut penilaian masyarakat, telah terjadi perubahan atau degradasi hutan dibandingkan beberapa tahun kebelakang. Saat ini hutan telah rusak dan gundul. Selain kerusakan hutan, juga terjadi ledakan hama 15 tahun yang lalu yang mengakibatkan rusaknya tanaman pisang dan mendorong masyarakat beralih ke tanaman kakao.

Terkait *illegal logging*, masyarakat menuturkan bahwa pelaku *illegal logging* bukan berasal dari masyarakat Bayas Jaya. Umumnya pelaku *illegal logging* adalah oknum yang memiliki kekuasaan. Alasan masyarakat enggan melaporkan terjadinya *illegal logging* adalah alasan keamanan bagi masyarakat pelapor. Beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal logging* adalah: (1) kurangnya pemantauan petugas, (2) harga kayu yang tinggi khususnya jenis kayu sonokeling, (3) kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam melaporkan terjadinya *illegal logging*, dan (4) masalah kewenangan penindakan dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana sektor kehutanan merupakan wewenang provinsi, (5) pelapor mendapat intimidasi dari pihak lain karena melaporkan terjadinya *illegal logging*. Karena Dinas Kehutanan Provinsi memiliki keterbatasan dalam memantau seluruh areal hutan di Provinsi Lampung, maka aktivitas *illegal logging* belakangan menjadi marak di Provinsi Lampung.

*Illegal poaching* atau pemburu binatang liar *illegal* seperti rusa dan babi hutan masih terjadi. Pemburu liar biasanya datang secara berkelompok dengan membawa senjata dan anjing-anjing pemburu. Untuk babi hutan, pemburu biasanya menggotong hasil buruan. Namun untuk rusa, pemburu biasanya sudah memotong-motong hasil buruan dan dimasukkan dalam karung. Menurut pak Iswanto (Kepala Dusun Sinar Jaya), para pemburu berasal dari Kabupaten Pringsewu.

### 3.8 Mekanisme insentif

Insentif adalah pemberian reward baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial (Hasibuan, 2010) atas prestasi tertentu atau dalam rangka mengharapkan ekspektasi pencapaian tertentu. Insentif diberikan dalam rangka apresiasi terhadap kinerja, mempertahankan kinerja, maupun mengharapkan kinerja tertentu pada masa yang akan datang.

Menurut Terry (1978), Krietner dan Kinicki (2000), bentuk insentif secara umum adalah (a) insentif individual karena prestasi dengan standar tertentu yang telah ditetapkan. (b) insentif kelompok yang diberikan kepada kelompok karena pencapaian kinerja dari tim/kelompok, (c) pembagian laba (*profit sharing*) kepada seluruh organisasi, dan (d) pembagian perolehan (*gain sharing*) berupa imbalan atas seluruh karyawan karena adanya peningkatan kinerja organisasi.

Dalam konteks studi ini, bentuk-bentuk insentif yang dapat diidentifikasi meliputi:

A. Insentif finansial yang meliputi

- a. bantuan sosial kepada kelompok tani seperti bantuan dana LUAP (Lembaga Untuk Agribisnis Pertanian) yang diberikan dalam bentuk bibit kedele dan peralatan pertanian pada tahun 2017. Sumber dana dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Lampung.
- b. Bantuan untuk penanaman pohon dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kepada Kelompok Tani Hutan seluas 100 ha untuk hutan lindung di Dusun Cirompang pada tahun 2017 (KPH Pesawaran). Sumber dana bantuan adalah BPDAS HL Way Seputih-Way Sekampung dengan *channeling* kepada Dinas Kehutanan via KPH Pesawaran.
- c. Bantuan pengendalian erosi dalam bentuk paket pembuatan *Gulley Plug* di Dusun Cirompang juga bersumber dari BPDASHL Way Seputih Way Sekampung.
- d. Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Dana tersebut dialokasikan berbentuk pembuatan usaha tenda, sound system, dan perlengkapan pesta. Insentif untuk pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai belum menjadi prioritas desa. (Gambar 4)
- e. Fasilitasi dana desa dan pembangunan infrastruktur jalan desa, jalan pertanian, pembangunan sekolah, dan berbagai bentuk lainnya tipikal Alokasi Pembangunan Desa di Indonesia (Gambar 4).
- f. Fasilitas pembangunan sarana sanitasi dan air bersih melalui program PAMSIMAS

B. Insentif nonfinansial berupa:

- a. Penguatan 9 kelompok-kelompok tani hutan (KTH) sebagai persiapan menjadi mitra KPH dalam skema perhutanan sosial
- b. Pendampingan program dana desa dalam rangka peningkatan tatakelola dana desa
- c. Program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa (Gambar 4)

Insentif seluruhnya diberikan kepada kelompok tani/kelompok tani hutan dengan mekanisme pemberian insentif mengikuti standar tata kelola masing-masing lembaga pemberi bantuan. Peran pemerintah lebih dominan karena insentif berupa bantuan maupun program diinisiasi dan ditetapkan oleh petugas pemerintah. Namun demikian, mekanisme insentif belum mempertimbangkan aspek kesetaraan gender karena seluruh insentif diberikan kepada kelompok laki-laki.

Sementara itu, peran swasta dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum teridentifikasi saat data penelitian dikumpulkan.

### 3.9 Best Practice/model Pengelolaan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan

Model pengelolaan lahan berkelanjutan dapat diobservasi di Dusun Cong Kanan dan Lebak Damar. Pada lahan marga, model wanatani dengan tanaman pokok coklat yang dikombinasikan dengan tanaman kayu medang serta, pisang, melinjo, aren, kemiri, kelapa serta beberapa jenis tanaman kayu lainnya telah secara mandiri dikembangkan oleh masyarakat. Dari lahan ini, setiap bulan petani dapat panen pisang, melinjo, kemiri, dan coklat. Sementara kayu medang umumnya digunakan saat keluarga membutuhkan kayu untuk rumah sendiri. Dalam model ini, kayu merupakan tabungan keluarga sementara tanaman coklat, kemiri, pisang berguna untuk menunjang *cash flow* keluarga.

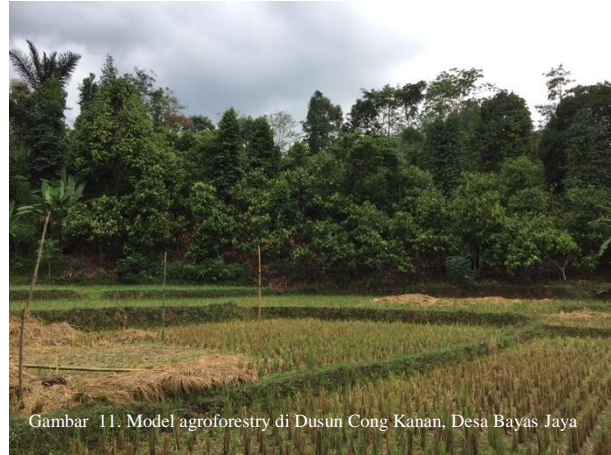
Agak sedikit berbeda dengan model yang ada di Dusun Sinar Jaya, Desa Bayas Jaya. Di Dusun Sinar Jaya, model agroforestry yang dikembangkan berbeda dimana tanaman utama adalah coklat namun tanaman tajuk tingginya meliputi cengkeh, kemiri, aren, kelapa, dan dilengkapi dengan tanaman pangan/hortikultura seperti pisang. Tajuk rendah dibiarkan dengan tanaman rumput/tanaman liar.

Menurut Pak Iswanto, model seperti ini dilakukan dengan alasan: (1) lahannya miring sehingga tanaman tajuk rendah dapat mengurangi erosi, (2) keterbatasan tenaga kerja untuk melakukan usahatani yang intensif, (3) memberi cashflow yang baik dari tanaman coklat, pisang, dan kelapa, (4) tanaman kayu digunakan sebagai tabungan saat keluarga membutuhkan kayu untuk bangunan sendiri.

### 3.10 Pengelolaan sampah, sumber air, dan sanitasi

Umumnya setiap rumah tangga menghasilkan 0.5 sd 1 kantong kresek sampah per hari dan tidak dibedakan antara sampah organik dan non-organik. Tempat yang menjadi pembuangan sampah masyarakat adalah pinggir sungai/selokan atau lahan miring/jurang. Kelembagaan/organisasi pengelolaan sampah belum dimiliki sehingga sampah menumpuk di beberapa titik, khususnya pinggir sungai. Perilaku ini yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan akibat sampah yang semakin meningkat volumenya.

Sumber air dalam masyarakat di Desa Bayas Jaya secara umum berasal dari Pamsimas dan sumber air dari swadaya masyarakat. Pamsimas berada di Dusun Cirompang dan Lebak Damar. Kualitas air sangat tergantung dari kondisi hujan. Saat hujan, air yang disalurkan



Gambar 11. Model agroforestry di Dusun Cong Kanan, Desa Bayas Jaya



Gambar 12. Model agroforestry di Dusun Sinar Jaya



keruh dan sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk air bersih. Saat kemarau, kondisi air lebih bersih. Saat ini belum ada pemantauan tentang kualitas air bersih untuk masyarakat.

Untuk kebutuhan MCK, masyarakat menggunakan sumber air dari sungai. Masyarakat di Dusun Bayas dan Congkanan umumnya sudah memiliki jamban permanen. Sedangkan masyarakat di Dusun Lebak Damar, Cirompang, dan Dusun lainnya masih menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar. Secara bertahap, program Pamsimas sudah memperkenalkan penggunaan jamban cetak. Masyarakat dapat mengakses alat cetak di fasilitas kesehatan masyarakat setempat. Namun, masih butuh waktu untuk menjadikan seluruh masyarakat memiliki jamban yang lebih sehat.

### 3.11 Potensi jasa lingkungan

#### 1. Jasa air bersih

Jasa air bersih untuk masyarakat telah dilaksanakan sejak lama. Terakhir, jasa air bersih ini mendapat investasi pemerintah berupa program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) untuk kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan program PAMSIMAS adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan peri-urban (Dirjen Cipta Karya, 2016).

Dusun 1 Bayas Jaya dan Cong Kanan sudah memiliki fasilitas ini yang dibangun sejak 3 tahun yang lalu. Sumber air berasal dari daerah hulu/kawasan hutan pada wilayah upstream. Program PAMSIMAS yang dinikmati bersifat bebas biaya, namun masyarakat harus membayar dana iuran pemeliharaan fasilitas. Besaran iuran bulanan sekitar Rp 75.000 s.d. Rp 100.000 per tahun.



Gambar 13. Pemanfaatan jasa air bersih untuk rumah tangga di Dusun Cong Kanan, Desa Bayas Jaya

Sementara dusun-dusun lainnya untuk jasa air bersih masih dilakukan secara swadaya masyarakat. Namun, program PAMSIMAS nampaknya akan terus berkembang untuk mencapai dusun-dusun tersebut.

Tantangan dari pelayanan jasa air bersih ini adalah tentang keberlanjutan pelayanan ini dari sisi organisasi maupun dari sisi sumberdaya air. Dari sisi organisasi, pelayanan jasa air bersih ini belum memiliki organisasi yang mantab karena masih tidak adanya aturan tertulis tentang hak dan kewajiban penerima jasa air bersih. Dari sisi sumberdaya air, pelayanan jasa air bersih ini akan berkelanjutan jika sumberdaya hutan tetap dijaga secara baik pada masa kini dan masa-masa yang akan datang.

## 2. Potensi wisata air terjun

Desa Bayas Jaya memiliki anugrah alam berupa air terjun yang berada di Dusun Cong Kanan pada posisi LS 5°33'2.02\*S; BT: 104°58'35.65 T dan masuk pada kawasan hutan lindung. Desa Bayas Jaya secara resmi belum memberikan nama air terjun tersebut. Potensi air terjun untuk ekowisata belum optimal karena beberapa hal, yaitu (1) masih belum ada akses jalan yang memadai, (2) belum ada promosi wisata dari pihak desa, (3) belum ada intervensi pembangunan untuk mendukung objek wisata ini.

Dusun Cong Kanan sebenarnya sudah memiliki fasilitas jalan yang memadai untuk sampai ke dusun. Namun demikian, akses jalan ke wilayah dalam Cong Kanan masih buruk, termasuk akses jalan menuju air terjun. Pemerintah desa juga belum melakukan retribusi untuk pengunjung dadakan yang datang. Oleh sebab itu, bila ekowisata ingin dikembangkan, maka pemerintah daerah (desa maupun kabupaten) perlu mengalokasikan anggaran pendukung.

Dalam APBDES 2017 belum tercantum rencana pembangunan infrastruktur jalan menuju ke air terjun. Untuk itu, perlu advokasi kepada pemerintah desa untuk menjadikan jasa ekowisata ini sebagai salah satu sumber penerimaan yang berkelanjutan desa.

Di sisi lain, KPHL Kabupaten Pesawaran telah secara eksplisit memasukkan air terjun sebagai potensi pengembangan jasa lingkungan oleh KTH Cong Kanan. Dengan demikian, potensi jasa lingkungan ini memiliki prospek pengembangan di masa yang akan datang.





Gambar 14. Air terjun di Cong Kanan dan akses ke air terjun Cong Kanan

### 3.12 Potensi risiko

#### 1. Risiko produksi pertanian

Penyakit busuk buah pada tanaman coklat. Penyakit ini menyerang hampir diseluruh areal perkebunan coklat petani. Bila menyerang, produksi coklat akan turun mencapai 50% dari produksi normal. Hasil wawancara, serangan penyakit ini terjadi sejak tahun 2014/2015. Upaya petani seperti memberikan obat-obatan tidak berhasil sehingga kerugian terus terjadi.



Gambar 15. Tanaman coklat yang terserang busuk

#### 2. Illegal logging

Illegal logging terjadi pada tahun lalu dan memiliki potensi ancaman keanekaragaman hayati, kondisi lahan, dan juga kondisi DAS di Way Khilau. Untuk daerah lain, secara sporadik Dinas Kehutanan dan Tim Illegal logging pernah menangkap pelaku maupun pendukung illegal logging. Untuk Register 21, upaya penindakan hukum belum dilakukan saat laporan ini ditulis.

Illegal poaching (pemburu ilegal) juga masih terjadi khususnya untuk rusa, burung, dan babi hutan. Para pemburu biasanya datang secara berkelompok dengan membawa anjing berburu. Untuk satwa rusa, hasil buruan biasanya disimpan dalam karung sementara untuk babi hutan, hasil buruan

biasanya dipikul dan dijual ke pasar terdekat seperti Pringsewu, Pagelaran, maupun Fajar Esuk. Masyarakat bersikap pasif terhadap aktivitas

### 3. Tanah longsor akibat hujan

Potensi tanah longsor yang merugikan pemukiman dapat dan pernah terjadi di Dusun Cong Kanan Januari 2017 yang lalu. Saat itu, 2 rumah tertimpa longsor tanah. Potensi longsor cukup besar khususnya di dusun Cong Kanan karena permukiman di dusun ini berada diapit oleh dua perbukitan dan areal yang dapat ditempati (habitable) sangat sempit. Akibatnya, masyarakat membuat permukiman di areal yang sebenarnya tidak layak ditempati untuk permukiman. Pola permukiman di Bayas Jaya umumnya memanjang pada lembah yang sempit.



Gambar 16. Permukiman di lerang bukit Dusun Cong Kanan

Seiring bertambahnya penduduk karena pendatang maupun pertumbuhan alamiah, maka pemukiman baru menggunakan areal di belakang yang merupakan punggung bukit.

### 4. Potensi rusak infrastruktur

Banjir tahun 2017 yang lalu juga menyebabkan rusaknya beberapa infrastruktur yang dapat mengancam aktivitas warga. Infrastruktur fondasi jembatan serta jalan terkena dampak dari banjir tersebut. Kerjasama dengan dinas pekerjaan umum untuk mendorong perbaikan infrastruktur sangat diperlukan.



Gambar 17. Fondasi jembatan yang rusak



## 5. Risiko air bersih

Air bersih merupakan unsur penting dalam pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Di Desa Bayas Jaya, air bersih umumnya disediakan melalui PDAM, Pamsimas, dan mandiri berupa sumur. Untuk fasilitas Pamsimas dan PDAM, infrastruktur air bersih relatif baik. Namun infrastruktur air bersih untuk yang dikembangkan secara mandiri perlu peningkatan kondisinya karena saat hujan, air yang masuk dalam sistem sangat keruh dan tidak layak untuk konsumsi. Oleh sebab itu, upaya untuk mengurangi kekeruhan dapat mengurangi risiko yang bersumber dari air bersih.



Gambar 18. Air keruh pada bak distribusi

## 6. Risiko Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah domestik dilakukan secara individual rumah tangga. Sampah umumnya dibuang di pekarangan atau ditempat lain di pinggir sungai. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di beberapa titik di pinggir jalan maupun sungai/jembatan. Hal ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat serta alirang sungai.



Gambar 19. Pembuangan sampah di sekitar Bayas Jaya

## 7. Ekspektasi Masyarakat yang Tinggi

Proyek ini memberikan harapan kepada masyarakat di Sub Sub Das Way Khiluan untuk meningkatkan kondisi DAS dan juga tentunya benefit lainnya. Selama ini, masyarakat merasa masih kurang mendapatkan dukungan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga, pada FGD maupun saat wawancara individual dan kelompok, masyarakat mengharapkan banyak hal baik yang terkait tujuan proyek maupun harapan-harapan yang berada di luar tugas proyek.

Harapan yang tinggi tersebut bernilai positif untuk proyek dalam mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Namun demikian, ekspektasi yang tinggi bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi hambatan pada saat implementasi.

### 3.13 Usulan Indikator Sosio-Ekonomi dan Gender

Berikut, adalah beberapa indikator-indikator penting sebagai alat pengukur pencapaian output proyek CCCD. Indikator-indikator tersebut meliputi.

Tabel 8. Usulan indikator untuk pelaksanaan CCCD di Provinsi Lampung

No	Usulan indikator	Kondisi baseline
<b>A</b>	<b>Kabupaten</b>	
1	Pelaksanaan sosialisasi PUG (Pengarutamaan Gender dan Anggaran Responsive Gender)	Sosialisasi PUG dan ARG baru dimulai
<b>B</b>	<b>Desa</b>	
1	Peraturan desa pengelolaan sumberdaya hutan dan DAS	Belum ada
2	Terbentuk desa Bayas Jaya sebagai desa Proklam	Belum memiliki jejaring desa iklim
3	Prosedur penanganan bencana	Belum ada peraturan desa tentang penanganan bencana walaupun pernah terjadi sebelumnya
4	Tebentuk forum peduli sumberdaya hutan dan daerah aliran sungai	Belum ada forum/kumpulan peduli sumberdaya alam seperti sungai, air, dan hutan (flora dan fauna)
<b>B</b>	<b>Sosial</b>	
1	Kelompok tani hutan meningkat statusnya menjadi KTH Mitra atau HKm/perhutanan sosial	0 HKM/Program Perhutanan Sosial
2	Kemiskinan berbasis pengeluaran per bulan	17% masuk kategori miskin berdasarkan pengeluaran per bulan per kapita
3	Kelompok wanita yang aktif	KWT tidak ada yang aktif
4	Kelompok remaja aktif untuk menumbuhkan kesadaran isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan	Kelompok remaja tidak aktif dalam cross cutting issue
5	Keterampilan masyarakat tentang adaptasi iklim (KTH, KWT, Kelompok Tani, dan Remaja)	Antisipasi perubahan iklim belum ada
6	Ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan berkelanjutan	Kurang peduli pada aspek pengelolaan SD lahan berkelanjutan
7	Publikasi tentang cross cutting issue	Publikasi belum ada
8	Manajemen limbah domestic	Limbah domestik belum dikelola
9	Terbentuk KTH Baru sesuai dengan permintaan	Belum seluruh dusun memiliki KTH
<b>C</b>	<b>Ekonomi</b>	
1	Pendapatan per kapita per bulan masyarakat	Pendapatan rata-rata Pendapatan/ kapita/per bulan Rp 550.419
2	Produksi coklat di Bayas Jaya	Produksi coklat menurun mencapai penurunan 60% dari biasanya sekitar 800-1000 kg per ha

No	Usulan indikator	Kondisi baseline
3	Aktivitas di luar usahatani seperti industri rumah tangga berbasis HHBK	Non-usahatani hanya menyumbang 22% terhadap pendapatan rumah tangga
4	Jasa Lingkungan Air Bersih	Pengelolaan jasa lingkungan air bersih masih belum baik
5	Jasa lingkungan ekowisata air terjun	Potensi ekowisata air terjun belum optimal
D	<b>Gender</b>	
1	Pelatihan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif seperti: kerajinan bambu, produksi dan pengemasan HHBK yang melibatkan perempuan	Kelompok perempuan belum pernah mendapatkan pendampingan ketrampilan usaha
2	Kontrol perempuan dalam dalam aktivitas non usahatani	Peran tinggi tapi tidak memiliki kontrol
3	Kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan desa	Peran perempuan sangat kecil dalam rapat pengambilan keputusan kebijakan desa

#### IV. REKOMENDASI

Berikut adalah usulan rekomendasi kegiatan CCCD untuk 3 tahun yang akan datang. Rekomendasi ini mempertimbangkan aspek tingkat analisis untuk Model DAS mikro yaitu level tapak (Desa), mikro, dan meso (Kabupaten), serta mempertimbangkan sasaran capaian proyek CCCD seperti yang tersurat pada desain proyek pada Gambar 1, halaman 2.

Ada 5 peruntukan rekomendasi yaitu: (a) kabupaten, (b) desa, (c) sosial, (d) ekonomi, dan (e) gender yang secara rinci disajikan pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Usulan rekomendasi kegiatan untuk proyek CCCD Provinsi Lampung

No	Usulan indikator	Kondisi baseline	Rekomendasi	Untuk goals proyek nomor	Sasaran	Strategi pencapaian	Waktu pelaksanaan	Mitra
<b>A</b>	<b>Kabupaten</b>							
1	Pelaksanaan sosialisasi PUG (Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsive Gender	Sosialisasi PUG dan ARG baru dimulai	Melakukan pendampingan, sosialisasi, dan pelatihan PUG dan ARG di tingkat kabupten dan desa	1	Desa dan Kabupaten	Pendampingan dan Pelatihan	Q4 2018	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran
<b>B</b>	<b>Desa</b>							
1	Peraturan desa pengelolaan sumberdaya hutan dan DAS	Belum ada	Membentuk perdes pengelolaan SDA dan DAS	1	Desa	Pendampingan, FGD	Q3, 2018, Q1-Q3 2019	Pemerintah desa, kabupaten,
2	Terbentuk desa Bayas Jaya sebagai desa Proklim	Belum memiliki jejaring desa iklim	Mendampingi Desa Bayas Jaya menjadi desa pro-klim	1	Desa	Pendampingan, FGD	Q1-Q4 2019	Pemerintah desa, Kabupaten, KemenLHK, KPHL

No	Usulan indikator	Kondisi baseline	Rekomendasi	Untuk goals proyek nomor	Sasaran	Strategi pencapaian	Waktu pelaksanaan	Mitra
3	Prosedur penanganan bencana	Belum ada peraturan desa tentang penanganan bencana walaupun pernah terjadi sebelumnya	Menyusun peraturan desa tentang prosedur penanganan bencana	1	Desa	Pendampingan, FGD	Q2-Q4 2019	Pemerintah desa, BPBD Kabupaten
4	Tebentuk forum peduli sumberdaya hutan dan daerah aliran sungai	Belum ada forum/kumpulan peduli sumberdaya alam seperti sungai, air, dan hutan (flora dan fauna)	Memfasilitasi pembentukan Forum yang peduli sungai, air, hutan, maupun hutan (flora dan fauna)	3	Desa	Pendampingan	Q3, 2020	KPHL, Pemerintah Desa, Kelompok Remaja dan Ibu-ibu
<b>C</b>	<b>Sosial</b>							
1	Kelompok tani hutan meningkat statusnya menjadi KTH Mitra atau HKm/perhutanan sosial	0 HKM/Program Perhutanan Sosial	Pendampingan 3 KTH menjadi HKm/Perhutanan sosial	1	9 KTH	Pendampingan, FGD	Q3 2018 s.d Q4 2019	KPHL, BPDAS HL WSS, Dinas Kehutanan, Pemkab Pesawaran
2	Kemiskinan berbasis pengeluaran per bulan	17% masuk kategori miskin berdasarkan pengeluaran per bulan per kapita	Melakukan upaya menurunkan angka Kemiskinan dibawah 10% pada akhir proyek melalui pelatihan ketrampilan non-pertanian	2	Petani landless	Pelatihan ketrampilan non-usahatani seperti pertukangan, anyaman bambu, dsb.	Q4 2018, Q1-Q3 2019	Balai Latihan Kerja Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran
3	Kelompok wanita yang aktif	KWT tidak ada yang aktif	Memfasilitasi Pendampingan 3 KWT di 3 dusun agar menjadi aktif	2	KWT	Pendampingan melalui hibah kecil	Q3 2018, Q1-Q4 2019	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

No	Usulan indikator	Kondisi baseline	Rekomendasi	Untuk goals proyek nomor	Sasaran	Strategi pencapaian	Waktu pelaksanaan	Mitra
								Kabupaten Pesawaran
4	Kelompok remaja aktif untuk menumbuhkan kesadaran isu perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan	Kelompok remaja tidak aktif dalam cross cutting issue	Memfasilitasi Pelatihan untuk kelompok remaja tentang sadar 3 isu Rio Conventions	2	Kelompok remaja	Pendampingan melalui hibah kecil	Q3, 2018, Q1-Q3 2019	Pemerintah Desa, Dinas terkait (Dispora) di Kabupaten Lampung Barat
5	Keterampilan masyarakat tentang adaptasi iklim (KTH, KWT, Kelompok Tani, dan Remaja)	Antisipasi perubahan iklim belum ada	Memfasilitasi pelatihan adaptasi perubahan iklim	2	KTH, KT, KWT	Pelatihan peningkatan kemampuan adaptasi iklim	Q1-Q4 2019	Badan Meteorologi dan Geofisika, Dinas Kehutanan, KPHL
6	Ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lahan berkelanjutan	Kurang peduli pada aspek pengelolaan SD lahan berkelanjutan	Memfasilitasi demplot Praktik pengelolaan SD Lahan berkelanjutan di dusun Cirompang, Sinar Jaya	2	KT, KTH, KWT, Kelompok Remaja	Demonstrasi plot di kawasan lahan marga dan hutan lindung	Q1 2019	
7	Publikasi tentang cross cutting issue	Publikasi belum ada	Membuat publikasi berupa bulletin, FB, televisi, radio talkshow	3	Masyarakat, pemda, BPDAS se Indonesia,	Produksi buletin/majalah, video best practices, buku,	Q3-Q4 2018, Q1-Q4 2019	BPDAS HL WSS
8	Manajemen limbah domestik	Limbah domestik belum dikelola	Pelatihan pengelolaan limbah domestik untuk Dusun 1 dan 2 Desa Bayas Jaya	2	KWT	Pendampingan pengelolaan sampah dengan sekma hibah kecil di Dusun 1, Bayas Jaya	Q4 2018, Q1-Q3 2019	Dinas Kesehatan Kab. Pesawaran

No	Usulan indikator	Kondisi baseline	Rekomendasi	Untuk goals proyek nomor	Sasaran	Strategi pencapaian	Waktu pelaksanaan	Mitra
9	Terbentuk KTH Baru sesuai dengan permintaan	Belum seluruh dusun memiliki KTH	Pendampingan di Dusun Sinarjaya, Serkung Sintuk, Serkung Tengos untuk membentuk KTH	1	KTH di dusun yang belum ada KTH	Pendampingan oleh RF dan Petugas KPHL	Q3, 2018, Q1-Q3 2019	KPHL Kabupaten Pesawaran
D	Ekonomi							
1	Pendapatan per kapita per bulan masyarakat	Pendapatan rata-rata Pendapatan/ kapita/per bulan Rp 550.419	Melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan agar meningkat 20% saat proyek berakhir	1	KTH, KT, KWT	Pelatihan ketrampilan pertukangan untuk remaja dan rumah tangga tak punya lahan	Q4 2018, atau Q1-Q3 2019	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pesawaran
2	Produksi coklat di Bayas Jaya	Produksi coklat menurun mencapai penurunan 60% dari biasanya sekitar 800-1000 kg per ha	Melakukan pelathan peningkatan budidaya coklat yang baik	2	Kelompok Tani	Pelatihan dan Penampungan peningkatan budidaya coklat yang berkelanjutan	Q1 2019	Dinas Perkebunan Kabupaten, PT. OLAM atau pihak swasta lain
3	Aktivitas di luar usahatani seperti industri rumah tangga berbasis HHBK	Non-usahatani hanya menyumbang 22% terhadap pendapatan rumah tangga	Pelatihan peningkatan pendapatan non-farm sehingga berkontribusi 35% dalam pendapatn rumah tangga	2	KWT, KTH, Kelompok Remaja	Pelatihan industri kecil rumah tangga seperti keripik pisang, bubuk kopi, dan gula aren	Q1-Q4 2019	Dinas Perindustrian
4	Jasa Lingkungan Air Bersih	Pengelolaan jasa lingkungan air bersih masih belum baik	Pendampingan peningkatan pengelolaan jasa air bersih di tingkat dusun	2	Pengelola jasa air bersih, pemerintah desa	Pendampingan dan hibah kecil	Q4 2018 pendampungan, Q1-Q4 2019 hibah kecil	Dinas Kesehatan, PAMSIMAS

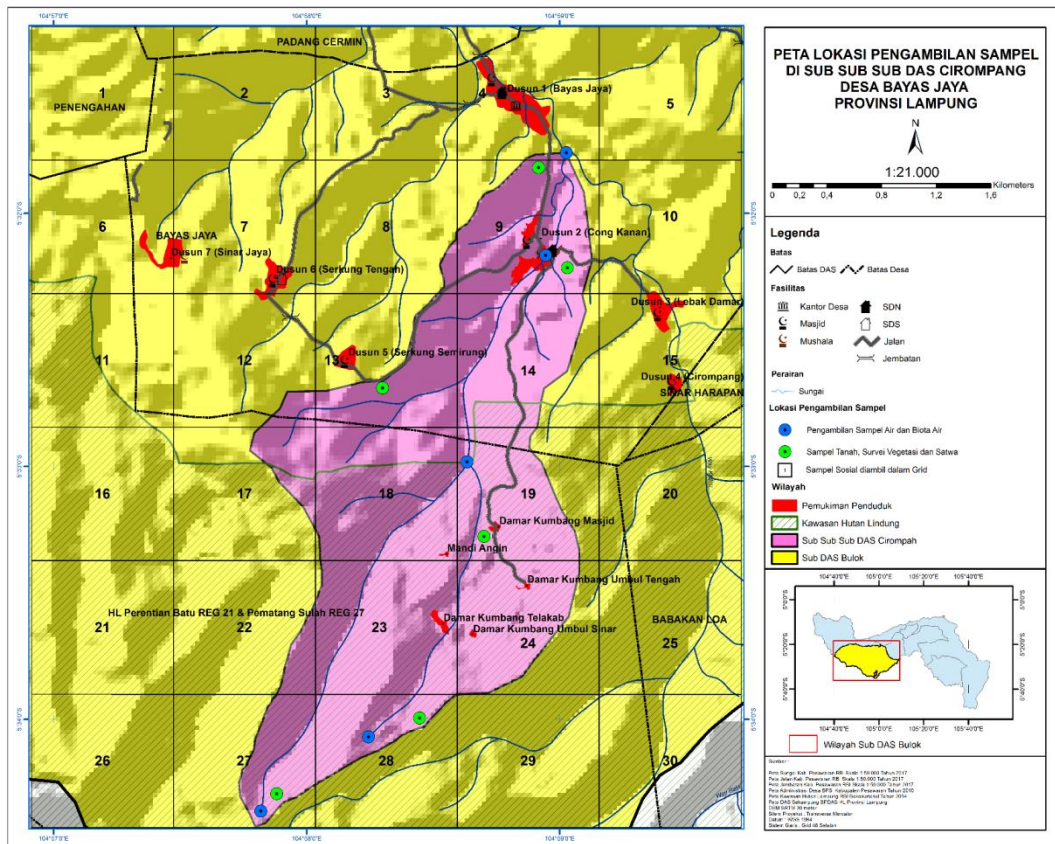
No	Usulan indikator	Kondisi baseline	Rekomendasi	Untuk goals proyek nomor	Sasaran	Strategi pencapaian	Waktu pelaksanaan	Mitra
					Bayas Jaya			
5	Jasa lingkungan ekowisata air terjun	Potensi ekowisata air terjun belum optimal	Pendampingan pengembangan jasa ekowisata air terjun	2	Kelompok remaja dan KTH di Cong Kanan	Pendampingan, pelatihan	Q4 2018	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, CSR perusahaan tertentu
<b>E</b>	<b>Gender</b>							
1	Pelatihan ketrampilan dalam usaha ekonomi produktif seperti: kerajinan bambu, produksi dan pengemasan HHBK yang melibatkan perempuan	Kelompok perempuan belum pernah mendapatkan pendampingan ketrampilan usaha	Melakukan pendampingan agar kelompok wanita tani mampu membangun usaha non-usahatani	2	KWT	Pendampingan KWT yang memiliki komitmen tinggi	Q1-Q4 2019	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran
2	Kontrol perempuan dalam aktivitas non usahatani	Peran tinggi tapi tidak memiliki kontrol	Melakukan pendampingan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kelompok tani hutan dan kelompok tani	2	KTH dengan melibatkan perempuan	Pendampingan KTH yang inclusive perempuan	Q4 2018, dan Q1-Q3 2019	KPHL dan Dinas Pemberdayaan Perempuan
3	Kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan desa	Peran perempuan sangat kecil dalam rapat pengambilan keputusan kebijakan desa	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan kelompok	2	KTH dengan melibatkan perempuan	Pendampingan KTH yang inclusive perempuan	Q4 2018, Q1-Q3 2019	KPHL dan Dinas Pemberdayaan Perempuan



## DAFTAR PUSTAKA

- Bullock, C., C. Kretch, and E. Candon. 2008. *The Economic and Social Aspects of Biodiversity. Benefits and Cost of Biodiversity in Ireland*. Government of Ireland.
- Dirjen Cipta Karya. 2016. *Pedoman Umum Program PAMSIMAS*. Dirjen Cipta Karya, Kemen PUPR. Jakarta.
- Hasibuan, MSP. 2010. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2010. *Organizational Behavior*. McGraw-Hill. New York.
- Jurnal Perempuan 50. 2006. *Pengarusutamaan Gender*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran No. 15 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. P. 15/V-Set/2009 tentang Pedoman Pembangunan Areal Model DAS Mikro.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah
- Kreitner, R. dan Kinicki, A. 2010. *Organizational Behavior*. McGraw-Hill. New York.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Allran Sungai Terp Adu Provinsi Lampung
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu.
- Overholt, C., MB. Anderson, C. Cloud, and J.E. Austin, 1985. *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*. Kumarian Press: Connecticut. pp.326.
- Status of Women, Canada, 1996. [http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-ac/c/course-cours-2017/eng/mod01/mod01\\_02\\_03.html](http://www.swc-cfc.gc.ca/gba-ac/c/course-cours-2017/eng/mod01/mod01_02_03.html)
- Terry, GR. 1978. *Principle of Managemen*, 7<sup>th</sup> Ed. Richard D. Irwin Inc. Homewood Illinois.
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- UNDP. 2001. *Gender Analysis: Learning Experience Tool Kit*. New York.
- WHO. 2008. *A Guide to Developing Knowledge, Attitude, Practice Surveys: Advocacy, communication and social mobilization for TB control*. WHO Press. Switzerland.

**LAMPIRAN**



Gambar 20. Persebaran grid pada Sub-sub DAS Way Khilau